

integrito



PRAKTIK BAIK INOVASI KELOLA DANA DESA

TEMUKAN

Referensi Ilmiah Antikorupsi di Jurnal Integritas

<https://jurnal.kpk.go.id>



Edisi 3 2020

DAFTAR ISI

5 Tajuk Dengan prinsip transparansi, semua Informasi tentang penggunaan anggaran desa dipasang di papan pengumuman desa agar bisa diakses warga.

14 Intip Harga Pangan Lewat Aplikasi Taupang

Memaksimalkan teknologi jadi keharusan di tengah pandemi. Berbagai inovasi muncul untuk menghindari kontak fisik antar manusia dan manusia dengan benda.

16 Menyebar Pesan Antikorupsi Keseluruh Negeri

Workshop Pesan Antikorupsi Untuk Seluruh Negeri bersama LPPL bertujuan menjangkau partisipasi publik melalui sebuah program yang mempertemukan praktisi radio yang peduli dengan tema antikorupsi di berbagai wilayah di Indonesia.

20 Enggak Sengaja Tanya Novel

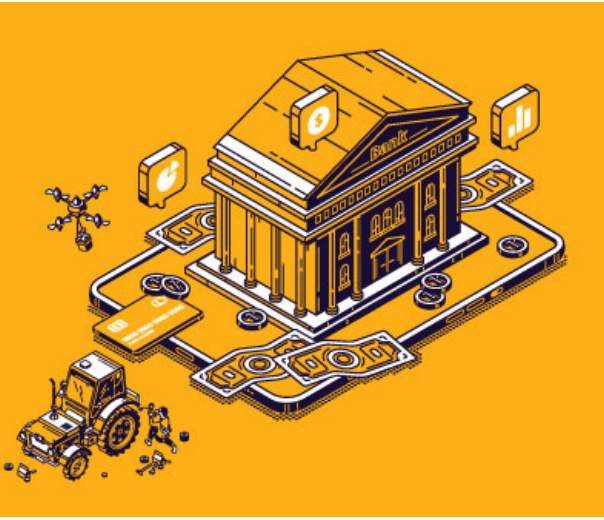
Tiga tahun berjalan, kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, masuk babak akhir

22 Gelitik Praktik Baik Cegah Korupsi

Pencegahan korupsi acapkali tak terdengar dengungnya. Meski begitu, rajutan komunikasi dan kerja antar lembaga terus berjalan



Ilustrasi oleh Integritas



38 Merajut Kolaborasi Mewujudkan Inovasi Daerah

Siapa yang tak mengenal Banyuwangi, selain budaya yang begitu kaya. Banyuwangi juga terkenal dengan pariwisata yang memanjakan mata. Namun Pemerintah kabupaten Banyuwangi terus menciptakan inovasi. Agar kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik bisa terpenuhi.

42 Jurus Jitu Manajemen Anti Suap Di BUMN

Angin segar perubahan di BUMN berhembus awal Februari 2020. Melalui sejumlah Surat Edaran Menteri BUMN, Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) mulai dilakukan.

47 Menteri Dua Rezim Yang Miskin Harta

Hidup dalam keprihatinan namun meninggalkan karya gemilang, inilah menteri Sutami. Sosoknya begitu sederhana. Ia tinggal di rumah ala kadarnya, bahkan saat ia sakit, ia tak bisa membayar biaya rumah sakit.

60 Menyapa Aksi Masa

Menghadapi aksi masa yang tak jarang berujung ricuh, Tata tidak pernah membayangkan harus menghadapi berbagai karakter pendemo yang menyampaikan aspirasi ke gedung Merah Putih KPK, termasuk menerima dukungan dari masyarakat.

62 Sepakat Diawal

Cara untuk melawan korupsi bukan sebatas menjauhi perilaku koruptif, tetapi juga mampu menegur lingkungan terdekat, ketika dilihatnya melakukan hal yang menjurus ke arah korupsi.

Integrito

Penanggung Jawab: Pimpinan KPK; **Pengarah:** Kepala Biro Humas KPK; **Pemimpin Redaksi:** Yuyuk Andriati Iskak; **Redaktur Pelaksana:** Hanifatun Nisa Nurrohmatia; **Staf Redaksi:** Evi Tresnawati, Afriyeni, Siti Sharatassiyah. **Kontributor:** Devi Lisnawati, Budi Prasetyo, Evodia Widya Lestari, Shantika Embun Diniakbari; **Desain & Layout & Grafis:** Iman Santoso; **Periset Data:** Sicilia Julianty Hutabarat; **Fotografer:** Sheto Risky Prabowo, Siti Sharatassiyah; **Sirkulasi:** Sicilia Julianty Hutabarat, Sheto Risky Prabowo. **Alamat Redaksi:** Komisi Pemberantasan Korupsi, Jln. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950; **Telepon:** (021) 2557 8300, Faks (021) 5289 2456; **Email:** integrito@KPK.go.id; **Website:** www.KPK.go.id; **Facebook:** Komisi Pemberantasan Korupsi; **Twitter:** @KPK_RI; **Instagram:** @official.KPK; **Youtube:** KPK RI



PERGI PAGI
PULANG PETANG
PENGHASILAN
PAS-PASAN
YANG PENTING
BERKAH





@candra.purnamasari12

Dear netijen. Memberantas korupsi tidak semudah membalikan telapak tangan. Semangat untuk KPK demi kita, kami dan Indonesia yg bersih dr korupsi

@leoramadhan_nkri

Yang terpenting sumber daya manusianya apapun sistemnya bagus tetapi SDM nya tidak mendukung itu percuma#KPK

@gunawanmahananto

Sosialisasikan selalu budaya malu kalau sampai harus korupsi. Untuk Gantikan budaya bangga kalau bisa korupsi.

@firdausrizkysaputra

Korupsi itu bisa dicegah bila UU Korupsi direvisi yaitu minimal hukuman 10 thn & maksimal hukuman mati .dgn merevisi UU tersebut bisa membuat efek jera pada pelaku koruptor dan dgn direvisi bisa memberi hukuman mati pada koruptor dan dgn begitu efek jera pasti ada dan para pelaku koruptor akan berfikir 2x bila mau melakukan tindak pidana korupsi.

@andiabba_king

Pencegahan korupsi harus sampai pada tingkat desa, dimana penggunaan dana desa dan alokasi dana desa sangat rawan d korupsi..yg semestinya masyarakat desa lah yg d sejahterakan dan desa pun bisa berkembang secara mandiri.. Sangat d sayangkan anggaran yg d alokasikan sekian triliun untuk pembangunan desa.

TAJUK

MEMIMPIKAN DESA BERINTEGRITAS

Desa Mallari, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dikenal sebagai desa tempat keluarga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tinggal. Kalla menghabiskan sebagian masa kecilnya di desa itu. Kini, desa Mallari berkembang dengan banyak cerita sukses berkat kreativitas warganya.

Adalah Andi Wahyuli, kepala desa perempuan desa Mallari yang memulai perubahan untuk warganya. Wahyuli berupaya mengelola anggaran desanya dengan partisipasi penuh warga sehingga semua kebutuhan warga terpenuhi. Prinsipnya, anggaran desa harus dikelola dengan menerapkan transparansi, partisipatif dan akuntabel.

Desa Mallari berjaya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dikelola oleh pengurus desa. Tak hanya berkembang diskala usaha demi pengembangan ekonomi desa, namun melalui BUMDES ini Wahyuli menggagas perubahan nilai-nilai untuk warganya. Koperasi yang dikelola oleh BUMDES dijadikan sebagai "koperasi kejujuran". Menurut Wahyuli, warga desa sepakat berlatih kejujuran lewat koperasi yang dibuat tanpa penjaga toko. Mereka mencatat sendiri transaksi yang dilakukan.

Anggaran desa juga dimanfaatkan Wahyuli dan warga desa untuk membuka peluang bekerja bagi warga disabilitas. Para penyandang disabilitas ini diberikan kesempatan untuk mengembangkan ketrampilannya melalui beberapa pelatihan yang dibiayai dengan anggaran desa.

Ketrampilan yang mereka punya akhirnya bisa menjadi produk unggulan desa. Mulai dari beragam produk makanan hingga songkok yang menggerakkan ekonomi desa. Wahyuli paham benar, anggaran desa tak melulu harus dikururkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Pengurus desa, pun warga desa, juga punya kebutuhan untuk mengembangkan ketrampilan dan pendidikannya.

Dengan prinsip transparansi, semua Informasi

tentang penggunaan anggaran desa dipasang di papan pengumuman desa agar bisa diakses warga. Wahyuli yakin, ini dibutuhkan untuk bisa mewujudkan desa berintegritas. Akses warga dia buka luas untuk bisa mengetahui alokasi dana desa dan diharapkan warga juga berpartisipasi memanfaatkan dana ini sekaligus mengawasi penggunaannya.

Menyadari kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan warga dan juga perangkat desa, sebagian anggaran disisihkan untuk pelatihan. Wahyuli yang juga agen Saya, Perempuan Antikorupsi (SPAK) merasakan manfaat dari pelatihan yang diterimanya. Oleh karena itu, alokasi dana desa digunakan salah satunya untuk memberikan pelatihan tentang antikorupsi untuk perangkat desanya.

Perangkat Desa Mallari berubah setelah mendapat pelatihan itu. Mereka yang sebelumnya sering tidak tepat waktu, kini tepat waktu melayani warga. Jika dulu mereka sering menerima gratifikasi, kini mereka sepakat menolaknya. Berbagai poster tentang antikorupsi mudah ditemui di kantor desa dan papan pengumuman di sekitar Desa Mallari.

Wahyuli bahkan mengeluarkan Peraturan Desa tentang pencegahan pernikahan usia dini. Angka pernikahan anak di desa ini cukup tinggi. Sebagian besar karena mencatut umur dan aparat desa dibayar untuk mengesahkan dokumen perkawinan. Setelah peraturan desa itu dikeluarkan, Wahyuli menyisihkan anggaran untuk sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini untuk warganya.

Mewujudkan desa berintegritas dan desa ramah anak adalah impian Wahyuli dan warga Desa Mallari. Dana desa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan warga. Membangun fisik dan infrastruktur memang penting, namun membagi pecahan dana desa untuk kebutuhan pengembangan mental dan ketrampilan warga desa sungguh tak bisa dinafikan.



ANPK 2020 - Presiden Joko Widodo memberikan sambutan secara daring dalam kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) 2020



PENAHANAN - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan terhadap enam tersangka dalam kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Kutai Timur terkait dengan Perkara Dugaan Suap Dalam Pekerjaan Infrastruktur Di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019-2020..

19:05 17

PENAHANAN 11 ANGGOTA DPRD - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 11 mantan Anggota DPRD Sumatera Utara yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap terkait fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019



ANPK

Aksi Nasional Pencegahan Korupsi

RABU, 26 AGUSTUS 2020

PEMBUKAAN ANPK 2020 - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membuka kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.



INTIP HARGA PANGAN LEWAT APLIKASI TAUPANG



Memaksimalkan teknologi jadi keharusan di tengah pandemi. Berbagai inovasi muncul untuk menghindari kontak fisik antar manusia dan manusia dengan benda. Tombol layanan parkir dan lift saat ini menggunakan sensor gerak, menu makanan berbentuk barcode, dan sejumlah aplikasi yang memberikan berbagai layanan seperti layanan kesehatan, layanan berbelanja, layanan belajar jarak jauh, layanan meting jarak jauh dan lain-lain.

Di Manado, teknologi telah diterapkan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan pemerintahnya. Program Manado Cerdas yang

terus dikembangkan lewat Cerdas Command Center (C3), merupakan sistem pengawasan kota dengan menatap layar monitor besar, dan pengoperasiannya dilakukan oleh para ahli teknologi komputer dan operator IT. Sejumlah aplikasi layanan masyarakat dapat diakses dengan sangat mudah karena berbasis elektronik. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui telepon genggam dimanapun dan kapanpun.

Salah satu aplikasi layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat Manado adalah aplikasi pantau harga pangan atau TauPang sangat menarik untuk dibahas. Melalui www.taupang.manadokota.go.id, warga bisa mengetahui informasi harga pangan setiap harinya. Pemerintah Kota (Pemkot) Manado membuat portal ini sendiri dan menggandeng Bank Indonesia (BI) untuk bekerja sama. "Setiap kali BI melakukan survey, hasilnya masuk ke portal kita," jelas Michael Mongdong, Staff Operator C3.

Masyarakat yang menggunakan Aplikasi TauPang bisa mengetahui harga pangan pada hari tersebut. Harga bahan pokok seperti beras, bawang, gula, minyak goreng hingga telur akan tampil

pada layar utama website TauPang. Masyarakat juga bisa melihat harga yang berlaku pada hari tersebut mengalami kenaikan atau penurunan dari harga di hari sebelumnya. Harga rata-rata komoditas yang ditampilkan adalah harga pada dua Pasar Tradisional Kota Manado, yaitu Pasar Bersehati dan Pasar Karombasan.

Ketika masyarakat membeli sesuatu di pasar dan harganya tidak sesuai, mereka bisa menyampaikan laporan atau keluhan dalam aplikasi. Melalui aplikasi ini juga, masyarakat bisa melihat statistik harga pangan dalam periode tertentu, seperti statistik harga pangan dalam seminggu atau dalam bulan tertentu.

Franky Mokodompis, Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Pemkot Manado mengatakan pengembangan aplikasi ini sudah berjalan tiga tahun dan menghabiskan anggaran lebih dari Rp 50 Miliar.



MENYEBAR PESAN ANTI KORUPSI KESELURUH NEGERI



Suara gelak tawa membahana di sebuah ruangan. Beberapa orang tengah duduk memandang layar laptop 15 inch. Laptop itu dikerumuni 2 sampai 5 orang. Sesekali mereka terlihat serius sambil menulis sesuatu. Ada juga yang berdiri mengambil makanan ringan. Mereka tidak sedang *nonton bareng* tayangan sepak bola. Serius tapi santai, mereka mengikuti Workshop Online “Pesan Antikorupsi Untuk Seluruh Negeri”.

Layar yang mereka lihat, menampilkan wajah-wajah rekan sesama pengelola radio milik pemda yang tergabung dalam Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di kawasan timur Indonesia yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan Papua. Selama 2 hari, mulai 27 hingga 28 Juli 2020, 40 lebih pengelola LPPL mengikuti materi-materi membuat pesan antikorupsi lewat iklan layanan masyarakat (ILM) dilanjutkan praktik langsung pembuatan ILM.

Kawasan Indonesia Timur menjadi tahap pertama dari rangkaian *workshop online* yang diselenggarakan Biro Humas KPK bersama Organisasi Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (INDONESIA PERSADA). Tahap kedua berlangsung 3 – 4 Agustus melibatkan 40 lebih LPPL di Kawasan Kalimantan. Tahap ketiga berlangsung 10 – 11 Agustus untuk LPPL di Kawasan Jawa Tengah dan Yogyakarta yang melibatkan 57 pengelola LPPL.

Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah berharap pelaksanaan workshop secara online tidak mengurangi substansi yang ingin disampaikan dalam workshop. “Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah salah satu bagian penting yang bisa bekerja sama dengan KPK. Dalam pelatihan kali ini, kami juga mengharapkan terjadinya pertukaran konten dan kerja sama secara intens serta rekan-rekan dapat menggunakan produk-produk KanalKPK secara gratis untuk ikut mendiseminasikan isu antikorupsi di daerah,” ungkap Febri.

Febri juga mengungkapkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak

bisa hanya dilakukan oleh KPK. “Kami menyadari bahwa upaya pemberantasan korupsi itu harus dilakukan secara bersama, dan teman-teman LPPL punya andil serta saluran yang sangat signifikan untuk bisa menyebarluaskan isu-isu antikorupsi,” ujarnya.

LPPL memiliki kekuatan dan poin penting karena kapasitasnya memberikan informasi yang jelas, valid, dan kredibel dari narasumber di daerah masing-masing. Sehingga saat menghadapi kondisi banyaknya alokasi anggaran, baik di APBN maupun realokasi anggaran di daerah terait penanganan pandemi covid 19, LPPL mampu berperan maksimal.

“Ini membutuhkan peran kita semua untuk bisa mengawal, baik dari aspek penganggarannya, maupun dalam aspek implementasinya. Kami harap peran itu juga bisa dilakukan bersama oleh teman-teman LPPL karena anggaran covid itu sampai atau tidak ke masyarakat yang paling tahu adalah teman-teman di daerah,” jelas Febri.

Sementara itu, Ketua Harian Umum Indonesia Persada, Syaifudin Ahmad menyampaikan agar keterbatasan infrastruktur (frekuensi) maupun sumber daya manusia yang ada di LPPL daerah tidak menyurutkan semangat LPPL agar tetap menyiarkan informasi yang baik bagi masyarakat.

Workshop Pesan Antikorupsi Untuk Seluruh Negeri bersama LPPL bertujuan menjaring partisipasi publik melalui sebuah program yang mempertemukan praktisi radio yang peduli dengan tema antikorupsi di berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam *workshop online* ini, narasumber praktisi radio dan pengelola LPPL berbagi wawasan dalam mengemas sebuah isu atau topik antikorupsi menjadi sebuah iklan layanan masyarakat (ILM) atau PSA (*public service announcement*). Materi konten antikorupsi yang ideal untuk LPPL disampaikan oleh Aries Widjoko Direktur, Eksekutif Persada.id dan materi konten praktek produksi PSA kreatif disampaikan oleh Arie Apriludy (Arie Dagienkz).

**PODCAST KANALKPK BISA DIAKSES
LEWAT APPLE PODCASTS DAN
SPOTIFY**

ENGGAKE SENGGAJA TANYA NOVEL



Tiga tahun berjalan, kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, masuk babak akhir. Pada 16 Juli 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Rahmat Kadir Mahulette dan 1,5 tahun penjara kepada Ronny Bugis. Putusan itu telah inkraacht, mengingat hingga 23 Juli jaksa penuntut umum (JPU) tidak mengajukan pernyataan banding.

Selesaiannya kasus penyiraman ini, tidak lantas menyelesaikan kekecewaan masyarakat. Sejak JPU menyampaikan tuntutan 1 tahun penjara untuk dua tersangka, masyarakat mengumandangkan kekecewaannya. Tuntutan itu dianggap penghinaan terhadap abdi negara yang bekerja memberantas korupsi di Indonesia dan menjatuhkan martabat Indonesia dimata dunia dalam penanganan tindak pidana korupsi. Tuntutan itu semakin tak masuk akal jika dibanding dengan tuntutan untuk kasus penyiraman air keras lainnya yang pernah terjadi di Indonesia.

Lantas, bagaimana Novel Baswedan menanggapi kondisi kasusnya? Pandji Pragiwaksono dalam Program Bincang Kanal bertajuk Enggak Sengaja Tanya Novel berfikir, semua penyerangan yang terjadi pada Novel mungkin diawali dengan rasa tersinggung karena tidak suka dengan apa yang Novel lakukan. Sepakat dengan yang dikatakan Pandji, Novel menyebut memberantas korupsi itu sebenarnya menolong orang. "Orang berbuat korupsi, itu sebenarnya dia terkena penyakit, yaitu penyakit akhlak. Dia berbuat korupsi, dia mencuri itu perbuatannya akan dilakukan terus menerus. Ada adiktif disana yang membuatnya tidak bisa berhenti. Ditangkap itu kita tolong dia agar tidak

berbuat lagi. Eh, tersinggung dia," ujarnya.

"Dokter menyarankan mata kiri saya diangkat untuk estetika," jelas Novel saat ditanya Panji kondisi matanya yang terkena siraman air keras. Novel berujar kondisi mata sebelah kirinya sejak Februari 2020 hingga sekarang tidak bisa melihat sama sekali, buta permanen. Sementara mata sebelah kanan masih bisa melihat, namun hanya 20 sampai 40 persen saja.

Problem pada mata kanannya sangat banyak. Korneanya luka carut, sehingga pembuluh darah masuk ke dalam dan menghalangi penglihatan. Lantas selaputnya yang sobek kena cairan kimia tumbuh bergelombang dan memunculkan bercak-bercak putih, mengaburkan pandangannya. "Kini mata kanan saya sensitif cahaya dan kabur. Beberapa dokter malah mengatakan tidak mungkin pulih kembali," ungkap Novel.

Bicara soal trauma, Novel menjawab jujur pertanyaan Panji, bahwa sebagai manusia, di awal kejadian dia sempat mengalaminya. Kemudian Novel memahami penyerangannya itu resiko pekerjaan. Apalagi sebelum penyiraman air keras, dia sudah sering menerima banyak teror, ancaman, hingga ditabrak berapa kali, serta diikuti orang untuk diserang.

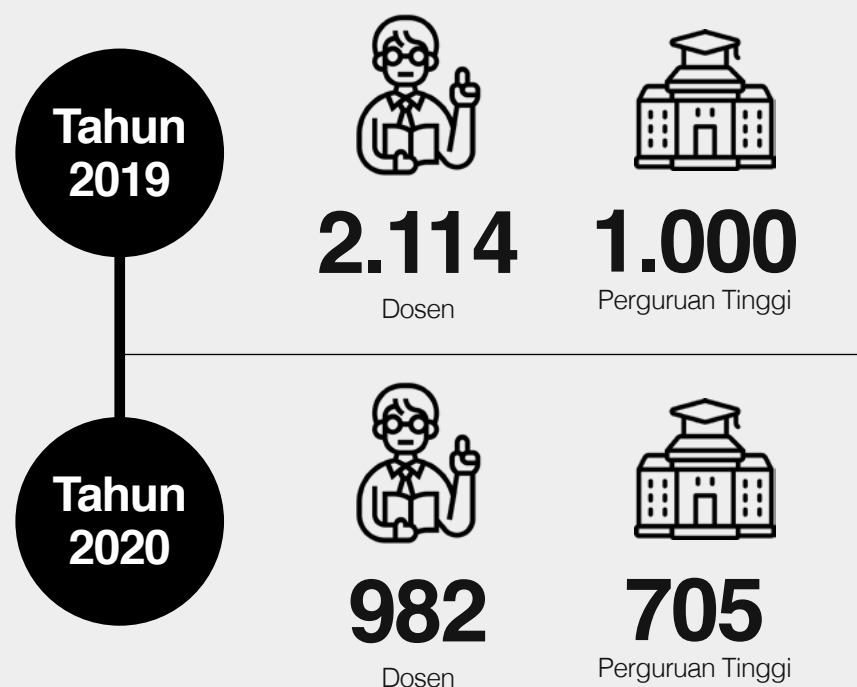
Yang menarik, Novel justru telah memaafkan pelaku dan telah menerima apapun yang terjadi pada dirinya. Melihat keterkejutan Panji mendengar pengakuannya, Novel mengatakan pada saat serangan itu terjadi, dia mengira kedua matanya buta dan mukanya hancur karena air keras. Setelah menjalani proses pengobatan, dia justru tetap punya semangat untuk berjuang. "Saya juga ingin mengajak kawan-kawan yang punya kesempatan, peluang dan waktu untuk berjuang, tetap harus semangat berjuang dan tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut, kalau takut kita akan sulit berjuang dengan sungguh-sungguh.

Jika Novel sudah memaafkan, apakah artinya pelaku sudah minta maaf? Menurut Novel, hingga saat ini pelaku tidak pernah minta maaf kepadanya. "Saya pernah meminta pada penyidik untuk bertemu, tapi penyidik tidak izinkan (bertemu). Bahkan saat disidang saya ingin lihat langsung tapi ternyata para terdakwa justru tidak dihadirkan disidang malah dengan *vicon* (*Video Conference*). Biasanya, kalau sidang itu yang dilindungi adalah saksi, saksinya memberi kesaksian lewat *vicon*, terdakwa hadir dipersidangan. Ini terbalik."

DATA AKADEMISI YANG TELAH MENGIKUTI PENINGKATAN KAPASITAS PENGAJAR ANTIKORUPSI

KPK menyadari bahwa pendidikan antikorupsi tidak selalu menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat langsung seperti keuntungan finansial, atau dirasakan manfaatnya secara instan. Namun, KPK meyakini bahwa pendidikan antikorupsi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional terkait aspek karakter diri dengan membentuk peserta didik yang berintegritas.

Karenanya, KPK memandang penting untuk melakukan pembinaan terhadap pendidik yang menjadi agen penyemai nilai integritas dan antikorupsi. Sehingga, harus dilihat sebagai upaya yang terintegrasi dalam perbaikan tata kelola pendidikan tinggi



1.727
Program Studi
dari
641
Perguruan Tinggi



GELITIK PRAKTIK BAIK CEGAH KORUPSI

PENCEGAHAN KORUPSI ACAPKALI TAK TERDENGAR DENGUNGNYA. MESKI BEGITU, RAJUTAN KOMUNIKASI DAN KERJA ANTAR LEMBAGA TERUS BERJALAN. BERKOORDINASI DENGAN BERBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN AGAR UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI GAUNGNYA SEMAKIN NYATA. STRATEGI DAN AKSI DALAM UPAYA MEMERANGI KORUPSI TERUS DISINERGIKAN, HINGGA PRAKTIK BAIK DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA BISA MENJALAR KE SELURUH WILAYAH INDONESIA.



Lima kementerian dan lembaga ditunjuk langsung oleh Presiden sebagai Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK). Melalui Perpres No 54 tahun 2018, pemerintah mencanangkan strategi nasional khusus dalam upaya pencegahan korupsi. KPK bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kantor Staf Presiden berkolaborasi menyusun aksi-aksi nyata perbaikan tata kelola pemerintahan khususnya untuk mencegah korupsi di dalamnya.

Dalam perjalanannya, Stranas PK telah menyusun tiga fokus perbaikan yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Ketiga fokus perbaikan tersebut melahirkan 11 aksi dalam Stranas PK. Terdapat 53 Kementerian/Lembaga (K/L) dan

Sasaran dari ANPK 2020 mencakup dua hal yaitu, peneguhan kembali komitmen semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan korupsi serta memperlihatkan instansi pusat dan pemerintah daerah yang telah berhasil menjalankan beberapa dimensi dari Stranas PK lewat praktik baik

542 Pemerintah Daerah (Pemda) yang diberi mandat melaksanakan 3 Fokus, 11 Aksi dan 27 sub-Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020.

Dalam kurun waktu 2019-2020, selain terus melakukan pendampingan dan monitoring terhadap pelaksanaan aksi, Stranas PK juga telah melakukan langkah-langkah korektif dan evaluatif untuk perbaikan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Pertama, terkait operasionalisasi sistem aplikasi monitoring/pelaporan, yang kedua terkait pelaksanaan aksi.

Koordinator Sekretariat Bersama Stranas PK, Herda Helmijaya menyebutkan sejauh ini upaya yang dilakukan Timnas PK masih berfokus pada perbaikan administratif, seperti langkah korektif berupa reorganisasi target-target setelah ditemukan beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan aksi.

Selain itu, lanjut Herda, reorganisasi target pada beberapa sub-aksi seperti Percepatan *Online Single Submission* (OSS), Penguatan APIP, Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran, serta Pelaksanaan Sistem Merit dilakukan agar sesuai dengan tuntutan perubahan kebijakan di tingkat Pusat. "Beberapa target dan output perlu direvisi agar lebih realistis dari sisi kewenangan pelaksanaan Tupoksi para pelaksana aksi dan juga dari sisi pencapaiannya," tuturnya.

Saat ini Timnas PK telah menapaki triwulan VII, capaian pada triwulan sebelumnya dirangkul dalam kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) 2020 pada Agustus lalu dengan menampilkan Praktik Baik Pencegahan Korupsi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firlu Bahuri saat membuka acara ANPK 2020 mengatakan sasaran dari ANPK 2020 mencakup dua hal yaitu, peneguhan kembali komitmen semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan korupsi serta memperlihatkan instansi



pusat dan pemerintah daerah yang telah berhasil menjalankan beberapa dimensi dari Stranas PK lewat Praktik Baik.

Terdapat enam praktik baik yang ditampilkan dalam gelar ANPK 2020 yaitu Praktik Baik Pemanfaatan NIK untuk Program Subsidi Pemerintah; Praktik Baik Penerapan E-Katalog dan Marketplace dalam Pengadaan Barang dan Jasa; Praktik Baik Keuangan Desa; Praktik Baik Penerapan Manajemen Anti Suap; Praktik Baik Pemanfaatan Peta Digital dalam Pelayanan Perizinan Berusaha; dan Praktik Baik Reformasi Birokrasi.

Dari data Stranas PK, Kementerian Pertanian telah berhasil melakukan praktik baik dalam pemanfaatan NIK untuk program subsidi pemerintah yaitu dengan melakukan pemadanan data penerima subsidi pupuk dengan data NIK milik Dukcapil Kemendagri yang mencapai angka 94%. Pola pendistribusian pupuk bersubsidi melalui eRDKK dengan sistem By Name By Address yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi pembuka praktik baik gelar wicara ANPK yang dapat disaksikan ulang melalui YouTube KPK RI.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo lantas memberi penjelasan mengenai pemanfaatan NIK dalam eRDKK yang

membuat penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih objektif, tepat sasaran dan sesuai dengan aturan.

"Pertanian sangat penting dalam sebuah negara. Apapun yang dilakukan jika pangan tidak siap maka akan menjadi masalah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan hanya sektor pertanian yang tumbuh 16,4 persen pada masa pandemi. Ekspor kita pun naik terus, dari 12,6 persen menjadi 15,4 persen sekarang 22,1 persen," ujarnya.

Agar bisa sampai pada capaian tersebut, Syahrul mengatakan ada tiga hal yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, yaitu penggunaan varietas yang baik, budidaya yang benar, dan pupuk yang cukup. Mentan juga tak lupa menggarisbawahi kalau pupuk menjadi satu hal yang sangat menentukan bagi kenaikan produksi pangan Indonesia, di dalamnya ada 34 juta petani Indonesia yang menggunakan pupuk.

Ia bercerita soal pupuk bersubsidi yang sudah berjalan sejak bertahun-tahun lalu, namun, kali ini Kementerian Pertanian membuat penyempurnaan dalam pola distribusinya. Inilah yang jadi keberhasilan Kementan dalam pemanfaatan NIK pada pola distribusi subsidi pupuk.

"Kita menggunakan NIK bekerja sama dengan Kemendagri. NIK itu penting, hal seperti kesalahan dan tumpang tindih bisa kita hindarkan. Itulah yang membuat penyaluran pupuk subsidi kita bisa di atas 90 persen tepat sasaran," ungkap Syahrul.

Gelitik praktik baik ini diharapkan dapat menular dan mampu direplikasi oleh lembaga dan pemerintah daerah lain dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

PRAKTIK BAIK INOVASI KELOLA DANA DESA

Tata kelola keuangan desa yang transparan menjadi salah satu rencana aksi pencegahan korupsi sebagai bagian dari fokus perbaikan Stranas PK yaitu penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Ini berkaitan dengan kucuran dana desa sebagai komitmen Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada rentang 2015 hingga 2019 dana desa yang telah dikurangkan oleh pemerintah mencapai Rp257 triliun untuk hampir 75.000 desa. Dana ini diperkirakan akan terus meningkat. Pada kurun 2019 – 2024 dana desa yang akan dikeluarkan pemerintah diperkirakan mencapai Rp450 triliun rupiah.

Dari laporan Kementerian Keuangan, hasil evaluasi dua tahun pelaksanaan awal Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilo meter jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016.

Namun dalam pelaksanaan keuangan desa,

risiko korupsi melekat dalam setiap tahapannya. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat korupsi Dana Desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Catatan ICW, dalam kurun waktu 2015-2018 terdapat sebanyak 252 kasus korupsi dana desa dan sebanyak 214 kepala desa tersangkut korupsi tersebut.

“Kasus-kasus korupsi dana desa ini meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap. Kasus korupsi anggaran desa ini menyebabkan total kerugian negara mencapai Rp107,7 miliar,” ungkap peneliti ICW, Egi Primayogha.

Koordinator Sekretariat Bersama Stranas PK, Herda Helmijaya menilai adanya penyelewengan dana desa tersebut harus ditekan dengan pendampingan dan pengawasan dari pihak terkait. “Aparat desa harus terus didampingi dan diawasi agar mereka paham, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam pengelolaan dana desa,” ungkapnya.

Kd_Rincian	Nama_Rincian	Anggaran	AnggaranPAK
4.1.1.01.	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	133.750.000,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa	795.407.300,00	0,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	25.612.000,00	0,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	419.389.000,00	0,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	182.800.000,00	0,00
Total		1.556.958.300,00	0,00

Kode	4.2.1.01.	Anggaran	795.407.300,00
Nama Rekening	Dana Desa	Perubahan	0,00
		Jumlah	795.407.300,00

Upaya pencegahan korupsi pada keuangan desa merupakan unsur yang termasuk dalam salah satu fokus Stranas PK yaitu penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Sasaran dari fokus aksi ini salah satunya adalah agar semakin menguatnya implementasi strategi pengawasan desa yang bersinergi, terarah dan terpadu.

Herda mengungkapkan hal yang terus didorong oleh Stranas PK adalah tersusunnya strategi nasional pengawasan keuangan desa agar keuangan desa dapat diawasi dan dikompilasi secara nasional. Menurutnya keuangan desa merupakan salah satu hal yang cukup rumit dalam pengelolaannya karena dana desa menjadi objek dari empat lembaga.

“Kita tahu yang berwenang menggelontorkan dana desa adalah Kementerian Keuangan, kemudian yang berwenang mengelola wilayah adalah Kementerian Dalam Negeri, lalu yang mengelola orang atau masyarakatnya adalah Kementerian Desa PDTT dan yang

melakukan pengawasannya sendiri adalah BPKP,” tuturnya.

Herda menyampaikan kekhawatirannya dalam pengelolaan dana desa jika keempat lembaga tersebut tidak saling bersinergi guna mengoptimalkan pengawasan dana desa. “Maka yang kita dorong adalah bagaimana keempat lembaga tersebut memiliki kesepakatan bersama mengenai bagaimana melakukan pengawasan hingga membuat sistem pengawasan dana desa secara nasional,” ungkapnya.

Hal lain yang tidak kalah penting menurut Herda adalah dengan terus mendorong inovasi desa dalam pengelolaan dana desa. “Jika orang desa tidak berinovasi dan kreatif dalam mengelola dana desa, ada kekhawatiran hal ini bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, jadi substansi utama pemanfaatan dana desa bisa tidak maksimal,” pungkasnya.

Hal ini lah yang mendorong Stranas PK menampilkan desa-desa yang telah memiliki inovasi dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di desanya masing-masing. “Kita ingin menonjolkan desa-desa yang telah inovatif dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas walaupun dengan cara sederhana yang mereka lakukan,” ungkapnya.

Dalam gelar ANPK 2020 yang dilaksanakan Agustus 2020, Stranas PK mengundang 4 kepala desa dengan praktik baik pengelolaan keuangan desa yang telah mereka

MERETAS MIMPI BANGUN DESA : CERITA DESA TARAM DAN DESA SUMBER AGUNG KELOLA DANA DESA

Membayangkan desa yang maju dan mampu bersaing dengan perkotaan bukanlah mimpi belaka. Beberapa desa bahkan kini jadi contoh praktik baik Aksi Nasional Pencegahan Korupsi 2020, seperti di Desa Taram, Sumatera Barat yang sudah melakukan inovasi terhadap pengelolaan keuangan desa dan mendapat pengakuan sebagai pemenang lomba desa yang dilaksanakan oleh Kemendagri Ditjen Bina Pembangunan Desa.



Defrianto Iskar
Kepala Desa Taram, dan Bupati Limapuluh
Kota, Sumatera Barat

Selamat! Desa Taram menjadi pemenang lomba dari Kemendagri. Bisa Anda ceritakan apa tantangan yang dihadapi saat melakukan inovasi praktik baik ini?

Jadi memang dengan adanya dana desa, tentu sekarang desa menjadi favorit, menjadi perhatian luar biasa, seperti kita ketahui lebih dari Rp250 triliun dikucurkan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dari banyaknya uang yang didanai pemerintah maka kami lakukan berbagai inovasi dalam pengelolaan keuangan desa. Awal-awal memang tentu saja ada beberapa pihak yang kurang nyamanlah dengan inovasi yang kita lakukan.

Bisa diceritakan contoh adaptasi masyarakat di sana seperti apa?

Contohnya begini, kami ada tujuh dusun dan dana desa yang kami terima itu berkisar Rp 700-800 juta, nah di desa kami ada istilah ketan takjil (kebijakan tahun genap dan ganjil), ketika dana desa itu kita

salurkan secara merata di 7 dusun, masing-masing akan menerima 100 juta. Namun, setelah kami pelajari ini kurang optimal, pemanfaatan dana ini kurang optimal. Karena kebutuhan masyarakat itu tidak terakomodasi oleh dana yang relatif sedikit. Makanya kami punya satu kebijakan bersama di desa, kami pilih di tahun ganjil itu kita hanya membiayai tiga dusun saja, prioritas. Jadi bisa lebih optimal, pembangunan optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian di tahun genap kita biayai 4 dusun, jadi mereka bisa berbagi 200-300 jutaan, itu lebih bermanfaat.

PR besarnya mengubah budaya ya pak, seperti kemampuan untuk mengelola keuangan, kemudian integritas, bagaimana tantangan-

tantangan untuk menghadapi hal itu?

Alhamdulillah, ketika para pemangku kebijakan sejak saya juga sebagai kepala desa ikut memberikan contoh-contoh baik, memberikan keteladanan,

memang masyarakat luar biasa. Kita punya namanya swadaya tukang nagari, jadi kita punya masyarakat yang berprofesi sebagai tukang memberikan partisipasinya, itu mereka tidak dibayar, dalam setiap kegiatan di desa, minimal sehari mereka menyumbangkan tenaganya untuk pelaksanaan kegiatan di desa.



Arifin Nur Azis
Kepala Desa Sumber Agung, Kabupaten
Kubu Raya, Kalimantan Barat

Inovasi seperti apa yang anda ciptakan untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa?

Desa Sumber Agung sudah menggunakan aplikasi, terutama untuk pengelolaan keuangan desa secara non tunai sebuah implementasi dari peraturan Bupati No. 27 tahun 2019 jadi mekanisme pengelolaan keuangan desa secara non tunai dan dipadukan dengan siskeudes secara online di tahun 2020 ini. Kami dari 2017 sudah menggunakan aplikasi siskeudes, namun ada aplikasi lain lagi yang kami kembangkan, yaitu Portal Desa Digital berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang bisa langsung secara mandiri diakses oleh masyarakat, disitu juga ada untuk transparansi publiknya, masyarakat bisa mengakses langsung informasi-informasi desa.

Bagaimana penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan untuk BLT (bantuan langsung tunai) dana desa selama pandemi Covid-19?

Teknis awalnya kita melalui prosedur non tunai, tetapi karena desa Sumber agung terletak jauh di ujung kabupaten (11 jam perjalanan), jadi itu tantangan tersendiri, dan jauh dari akses

perbankan. Maka kami tetap memberikan melalui penanggung jawab pengelolaan kegiatan, di situ ada kasi (kepala seksi) yang bertanggung jawab, uang tersebut kami transfer ke rekening kasi penanggung jawab dan nantinya akan disalurkan dari rumah ke rumah sesuai protokol kesehatan.

Caranya untuk memastikan pengawasan penyaluran benar-benar sampai ke masyarakat?

Kami melibatkan Babinkamtibmas, babinsa jadi ada tiga pilar desa yang betul-betul bersinergi dalam hal terutama untuk penanggulangan korupsi dan pencegahan penyalahgunaan keuangan desa. Kami juga sering melakukan semacam talkshow untuk pengelolaan keuangan desa. Setiap tahunnya kami melakukan bedah APBD mulai dari perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, hingga selesai di akhir tahun pertanggungjawaban itu.

Bagaimana hasilnya sejauh ini? Kepercayaan masyarakat, dukungan dari masyarakat terhadap program-programnya?

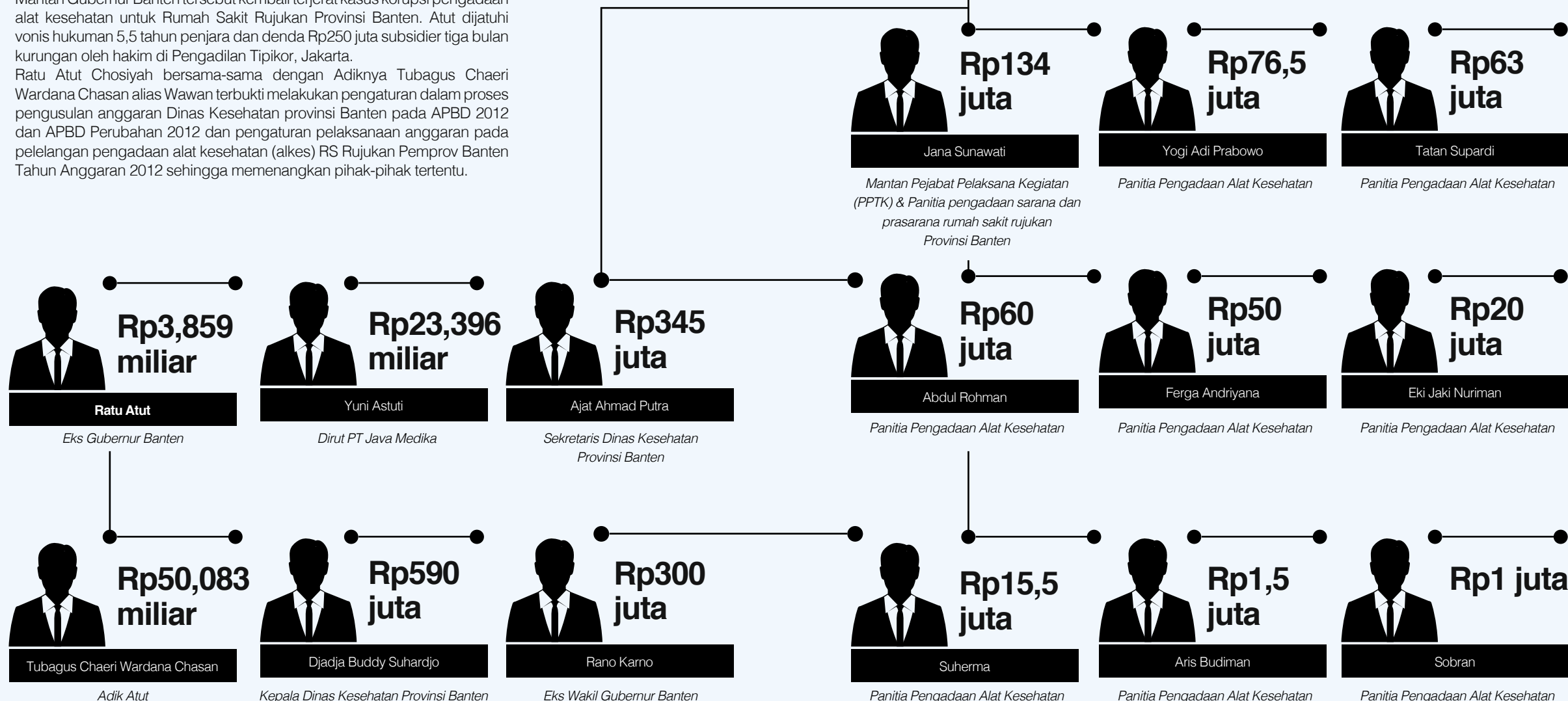
Titik awal tujuan kami adalah masyarakat bisa cerdas, bisa tahu, masyarakat bisa memahami bagaimana regulasi untuk tata kelola pemerintahan desa yang baik, mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban, semua gender termasuk perempuan juga kita libatkan dalam kegiatan tersebut, kegiatan talkshow untuk bedah APBD. Hal ini diwajibkan untuk diikuti, terutama untuk anak muda.

BAGI-BAGI DUIT KORUPSI

Kala menjalani pemidanaan 5 tahun penjara karena terbukti menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Ratu Atut Chosiyah, Mantan Gubernur Banten tersebut kembali terjerat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten. Atut dijatuhi vonis hukuman 5,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidier tiga bulan kurungan oleh hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Ratu Atut Chosiyah bersama-sama dengan Adiknya Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan terbukti melakukan pengaturan dalam proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan provinsi Banten pada APBD 2012 dan APBD Perubahan 2012 dan pengaturan pelaksanaan anggaran pada pelelangan pengadaan alat kesehatan (alkes) RS Rujukan Pemprov Banten Tahun Anggaran 2012 sehingga memenangkan pihak-pihak tertentu.



Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp79,79 miliar** sesuai laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK pada 31 Desember 2014. Lantas kemana saja dana tersebut mengalir? dakwaan menyebutkan uang haram tersebut masuk ke pihak-pihak berikut:



LANCAR LUNCUR KORUPSI PROYEK AIR MINUM

Ada-ada saja ulah pejabat publik dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi. Di tengah kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap pengelolaan dan penyediaan air minum, termasuk di beberapa wilayah bencana, mereka justru menyalahgunakan posisi dan kewenangannya untuk menerima suap dari pihak swasta yang mengerjakan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR.

RALAT REDAKSI : Dalam edisi Jaminan Kesehatan Yang Tak Sehat, terdapat kesalahan penulisan dalam rubrik Jejak Kasus halaman 32-33. Di rubrik tersebut tanggal penetapan tersangka RIZ(anggota BPK RI) dan LJP(Komisaris Utama PT. Minarta Dutahutama) adalah 25 September 2018.

Kami atas nama redaksi meminta maaf kepada pembaca Integrito atas kesalahan penulisan tersebut. Berikut, kami sertakan Jejak Kasus dengan penulisan tanggal penetapan tersangka yang benar:

PENETAPAN TERSANGKA

28 Desember 2018

1. Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Strategis di Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
2. Meina Woro Kustinah, PPK SPAM Strategis Wilayah IB
3. Teuku Mochamad Nazar, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Darurat Permukiman Pusat
4. Donny Sofyan Arifin, PPK SPAM Strategis IIA

25 September 2019

1. RIZ, anggota BPK RI
2. LJP, Komisaris Utama PT. Minarta Dutahutama

Suap Untuk Memuluskan Proyek

- Mengatur Pemenang Lelang
- PT WKE dan PT TSP terpilih sebagai pemenang lelang 12 paket proyek di Kementerian PUPR terkait proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018, total proyek Rp429 miliar
- Membagi Jatah Pengerjaan Proyek
- PT WKE mengerjakan proyek di atas Rp50 miliar, sedangkan PT TSP mengerjakan di bawah Rp20 miliar
- Membagi Jatah Suap
- PT WKE dan PT TSP diminta memberikan komisi 10% dari nilai proyek, 7% untuk Kepala Satker dan 3% untuk PPK. Suap diberikan saat proses lelang, dan sebagian lainnya saat pencairan dana dan penyelesaian proyek.
- Mempermudah pengawasan dan Memperlancar pencairan anggaran
- PPK memberikan kemudahan dalam pengawasan kegiatan proyek di lingkungan Satker PSPAM Strategis di Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Sehingga dapat memperlancar pencairan anggaran kegiatan yang dikerjakan PT WKE.

Proyek-Proyek Sumber Suap

- Proyek Pembangunan SPAM PDAM Binaan (Katulampa) Kota Bogor tahun 2017-2018.
- Proyek pembangunan SPAM IKK Balai Riang Kabupaten Sukamarah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Proyek pembangunan SPAM IKK Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Proyek Pembangunan SPAM IKK Sambang Makmur Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Proyek IPA Semboja Kalimantan Timur.
- Proyek-proyek di SPAM di Aceh diantaranya proyek IPA Air Bukit di NAD.
- Proyek penanganan Tanggap Darurat SPAM Sulawesi Tengah 2018 yang berlokasi di Donggala Sulawesi Tengah.
- Proyek pekerjaan Pengadaan Pipa dan Accessories Kebutuhan Keadaan Darurat 2018 yang berlokasi di Kota Bekasi Jawa Barat

MENERIMA PENGEMBALIAN UANG TERKAIT PERKARA

62 orang pejabat di Kementerian PUPR dan pihak lainnya telah mengakui menerima dan mengembalikan uang dengan total **Rp26,74 Miliar**





Hery Susanto Gun

Direktur Utama PT Sawit Golden Prima

PERKARA

Suap kepada Bupati Kukar Rita Widyasari untuk menerbitkan izin lokasi kepada PT SGP di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kukar, seluas 16 hektare yang akan digunakan untuk perkebunan sawit.

VONIS

Pidana 3,5 tahun penjara dan pidana denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan



Irene Irma

Direktur Utama PT TSP-Project Manager PT Wijaya Kusuma

PERKARA

Suap pejabat Kementerian PUPR pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) strategis

VONIS

Pidana 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 2 bulan penjara



Inna Silestyowati

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Jombang

PERKARA

Suap terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemerintahan Kabupaten Jombang

VONIS

Pidana 3 tahun penjara dan pidana denda Rp100 juta subsider 3 bulan penjara



Yuliana Enganita Dibyo

PT WKE-Project Manager PT TSP

PERKARA

Suap pejabat Kementerian PUPR pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) strategis

VONIS

Pidana 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 2 bulan penjara



Muhamad Baqir

Direktur CV Mahadir

PERKARA

Menyuap Wali kota Pasuruan Setiyono dalam hal pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Pasuruan dari APBD tahun anggaran 2018

VONIS

Pidana 2 tahun penjara dan pidana denda Rp50 juta subsider 2 bulan



Budi Suharto

Direktur PR WKE

PERKARA

Suap pejabat Kementerian PUPR pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) strategis

VONIS

Pidana 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 2 bulan penjara



Lily Sundarsih W

Direktur Keuangan PT Wijaya Kusuma Emindo dan Bagian Keuangan PT Tashida Sejahtera Perkasa

PERKARA

Suap pejabat Kementerian PUPR pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) strategis

VONIS

Pidana 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 2 bulan penjara

SUNJAYA PURWADISASTR

Bupati Cirebon

PERKARA

Suap terkait jual-beli jabatan di Kabupaten Cirebon.

VONIS

Pidana 5 tahun penjara dan pidana denda Rp200 juta subsider 6 bulan



AKU DAN SEBUAH JANJI PADA LAUT

Aku Bima. Menjadi sarjana di usia 22 tahun memang sudah jadi cita-citaku. Aku menyelesaikan studiku tepat waktu dengan harapan sebelum aku masuk dunia kerja, aku ingin menghabiskan waktuku setahun, untuk menjadi backpacker. Dan semua petualanganku akan aku tulis di catatan Bima.

Pria muda itu duduk dengan bukunya di dalam bus. Dia mengabaikan pemandangan yang dinikmati penumpang lain diperjalanan itu.

Sesekali pria itu menghela nafas, lantas termenung. Sesaat kemudian keningnya berkerut seperti berusaha mengingat sesuatu atau seseorang. Setelah menghela nafas lagi, Dia menulis sesuatu di bukunya. Pria muda itu bernama Bima, sarjana berusia 22 tahun yang tengah menghabiskan waktunya menjadi backpacker. Petualangannya ditulis rapi dalam buku yang dipegangnya.

Bima meninggalkan Desa Jambe Wangi dengan penuh tanya dibenaknya. Bagaimana orang-orang yang Dia temui di desa itu melanjutkan hidupnya? Pikirannya terus berputar, sampai saat Bima menyadari, gadis berparas cantik duduk disebelahnya dalam perjalanan ke Karimun Jawa melalui Jepara.

Bima memulai percakapan, "Ke Jepara juga? Saya rencananya akan ke Karimun Jawa."

"Iya, Saya ke Jepara. Ke Karimun Jawa bisa lewat Desa Bulu dari Pelabuhan Kartini, Mas. Saya sendiri pulang ke Desa Bulu, enggak jauh dari Pelabuhan Kartini. Menyeberang enggak bisa buru-buru, Mas. Kan ada jadwal penyeberangannya. Tidak setiap hari," jelas sang gadis.

Gadis itu bernama Kamila. Melalui perkenalannya itu, perjalanan Bima sampai di Desa Bulu. Disana Dia berkenalan dengan Kakak Karmila Sarpin dan istrinya Tari. Menunggu waktu menyeberang ke Karimun Jawa, Bima menginap di rumah Mangun, Paman Kamila.

Tinggal bersama Pakle Mangun, Bima dibuat kagum akan kemampuan Mangun hidup mandiri di tengah keterbatasannya sebagai tuna netra. Mangun mampu mengurus dirinya sendiri walau tanpa penglihatan. Dunia gelap yang dirasakannya, tak lantas menggiringnya jadi peminta-minta. Justru dia bisa menabung dari mengurus

orang yang membutuhkannya.

Dari Pakle Mangun, Bima mengetahui sosok Bu Kendar, Istri dari Pak Kendar, pengusaha perahu dan ukiran di Desa Buluh. Dari Kamila, Bima tahu ternyata Bu Kendar meminjamkan uang kepada Sarpin dengan bunga yang sangat besar. Untuk melunasinya, Sarpin mau tidak mau harus bekerja memperbaiki perahu-perahu Bu Kendar yang rusak kapan saja dibutuhkan.

Disuatu malam, Sarpin dan Bu Kendar berdebat mengenai pelunasan hutang piutang diantara mereka. "Ini satu juta dua ratus lima puluh ribu. Maaf saya tidak mau bayar satu juta empat ratus ribu, terlalu besar bunganya," keluh Sarpin kepada Bu Kendar.

"Kalau begitu kamu harus kerja 3 hari lagi untuk aku. Sudah kubilang, itu kalau kamu melunasi hutangmu minggu lalu. Ini sesuai kesepakatan, telat berarti denda berlipat-lipat," ucap Bu Kendar.

Ketegangan itu hilang saat Pak Kendar mendadak menyela perdebatan mereka. Dia meminta penjelasan mengapa Sarpina berhutang kepada istrinya. Sarpin membenarkan, dia berhutang dengan bunga yang sangat besar untuk biaya pernikahannya.

Setelah mendengar penjelasan Sarpin, Pak Kendar meradang, "Darti, jadi kamu memberikan uang pemberian dariku untuk Sarpin itu sebagai hutang? Aku

memberikan uang itu untuk Sarpin, tulus untuk menyumbang perkawinannya. Sampai hati kau berbuat begitu!"

Hubungan Sarpin dengan Keluarga Kendar, ternyata bukan hanya sekedar pegawai dengan atasan. Hubungan rumit membelit mereka bertiga. Melibatkan Kamila yang tak mengetahuinya. Mangun pun secara tak langsung juga terlibat dalam kisruhnya hubungan Keluarga Kendar dengan dua keponakannya. Bahkan, jauh sebelum itu, rahasia jahat yang diketahuinya justru telah melukainya hingga kehilangan penglihatan.

Bima merasakan bagaimana

ketabahan Pakle Mangun hidup dalam kesendiriannya. Tapi Lek Mangun memegang teguh prinsip kejujuran yang membuatnya hidup lebih tenang. Pakle Mangun ternyata menyimpan kenangan masa lalu mengenai ketamakan Darti, alias Bu Kendar.

Berkata jujurlah. Jika kita tidak bisa berkata jujur, maka alangkah baiknya jika kita tidak berbohong. Ini kutulis dibuku catatanku, kembali mengingatkanku untuk tidak berbuat kebohongan. Lantas adakah kebohongan lain yang akan terkuak di Desa Bulu selain kebohongan Bu Kendar?

Dengarkan selengkapnya kisah perjalanan Bima di Podcast Sandiwara Radio Catatan Bima, Episode Aku dan Sebuah Janji Pada Laut pada Spotify Kanal KPK di Podkes Kanal KPK.

Sampai jumpa.



MERAJUT KOLABORASI, MEWUJUDKAN INOVASI DAERAH

SIAPA YANG TAK KENAL BANYUWANGI, SELAIN BUDAYA YANG BEGITU KAYA, BANYUWANGI JUGA TERKENAL DENGAN PARIWISATA YANG MEMANJAKAN MATA. NAMUN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TERUS MENCIPTAKAN INOVASI, AGAR KEBUTUHAN MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK BISA TERPENUHI.

Abdul Azwar Anas, Bupati Banyuwangi memang patut berbangga hati. Bagaimana tidak, dalam kompetisi Innovative Government Award (IGA) 2019 Kabupaten Banyuwangi berhasil menyabet gelar kabupaten terinovatif. Tak tanggung-tanggung, sebanyak lima inovasi dalam pelayanan publik dianugerahi penghargaan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB).

Lima program yang mendapatkan penghargaan adalah program Rantang Kasih, Banyuwangi Mall, CHIPS Primadona Kami (Program Calon Harapan Insan Penghuni Surga, Prioritas Melayani dan Solusi Nasib Keluarga Miskin), Barisan Siap, hingga Banyuwangi Festival.

Anas, sapaan akrab Bupati Banyuwangi menyebutkan, penghargaan tersebut merupakan motivasi untuk terus melahirkan kembali inovasi publik yang menyejahterakan masyarakat. "Kami bersyukur

karena salah satu agenda pariwisata kami juga mendapatkan penghargaan ini," ungkap Anas.

Anas bercerita bagaimana Banyuwangi Festival atau B-Fest yang telah digelar sejak 2012 bukan sekedar sebagai agenda wisata. Lebih dari itu, B-Fest merupakan cara Banyuwangi melakukan konsolidasi di bidang budaya, infrastruktur, masyarakat dan ekonomi.

"Dalam mengerjakan *event* B-Fest, kami mengerjakannya tanpa *event organizer*. Birokrat, masyarakat, swasta, hingga TNI/Polri terlibat di setiap pelaksanaan. Secara tak langsung kami akhirnya bergotong royong menyukseskan event, yang





akhirnya menjadi modal sosial yang kuat Banyuwangi," kata Anas.

Menurut Anas, B-Fest memancing keterlibatan warga secara langsung, termasuk dalam menciptakan *event* yang bisa menarik wisatawan. Menurutnya, acara ini merupakan bentuk *transfer knowledge* untuk warga dalam membuat sebuah acara yang kreatif. "Dengan datangnya wisatawan, tentunya akan berdampak pada ekonomi warga Banyuwangi yang terus menggeliat," jelasnya.

Di sisi infrastruktur, Anas mencontohkan pelaksanaan balap sepeda internasional Tour de Banyuwangi Ijen. Para pembalap menempuh rute sekitar 600 km selama empat hari berkeliling di seluruh jalanan Banyuwangi.

"Balap sepeda ini, secara tidak langsung memaksa

kami melakukan konsolidasi infrastruktur fisik. Rute yang dilewati memaksa kami untuk memastikan jalannya harus teraspal dengan baik. Ini menjadi cara kami untuk melakukan kontrol terhadap kondisi infrastruktur fisik," kata Anas.

Anas menuturkan, banyak hal baik dan bermanfaat yang didapatkan dalam menggarap *event* B-fest. Salah satunya adalah terhadap sisi budaya Banyuwangi yang terus tumbuh dan terpelihara. Hal ini karena lebih dari separuh rangkaian *event* B-fest merupakan event tradisi dan budaya.

Beberapa kegiatan tradisi dan budaya diantaranya adalah Festival Gandrung Sewu, Festival Kebo-Keboan Alasmalang, Banyuwangi Ethno Carnival, Drumband Ethnic Festival, Festival Jaranan Buto, Festival Bala Ganjur hingga Festival Keboan Aliyan.

Namun dalam perancangan program inovatif, Anas menuturkan bahwa Pemkab juga menggandeng pihak lain, seperti dengan pihak kepolisian setempat.

"Tangan kami terbatas, namun dengan berkolaborasi dengan banyak

Tangan kami terbatas, namun dengan berkolaborasi dengan banyak pihak, jangkauan kami akan makin luas. Pelayanan publik kami jauh lebih optimal

pihak, jangkauan kami akan makin luas. Pelayanan publik kami jauh lebih optimal. Seperti yang kami lakukan dengan pihak kepolisian lewat program Barisan Siap yang juga menerima penghargaan serupa dari Menpan RB," kata Anas.

Polres Banyuwangi berhasil meraih penghargaan serupa lewat program Barisan Siap. "Barisan Siap" adalah akronim dari Bhabinkamtibmas Respons Pengaduan Setiap Masalah Publik, di mana salah satu programnya adalah pendirian rumah singgah bagi ibu hamil berisiko tinggi di Dusun Krajan, Jambewangi, Sempu, kawasan tepi hutan yang terdekat dengan Gunung Raung.

JURUS JITU MANAJEMEN ANTI SUAP DI BUMN

Erik Thohir

Menteri BUMN

Dalam salah satu rangkaian Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) 2020 yang digelar akhir Agustus lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang lima lembaga yang telah berhasil melakukan praktik baik penerapan manajemen anti-suap, yaitu Kementerian BUMN, SKK Migas, KADIN Indonesia, PT Pertamina Hulu Mahakam, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Membawa perubahan di BUMN jelas tidak mudah. Apalagi BUMN acap tersandung kasus korupsi bernilai besar. Diantara kasus hukum yang membelit BUMN, kasus suap di PLN dalam proyek PLTU Riau-1 dan kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat Garuda, paling disoroti masyarakat. Tak ayal, kinerja BUMN pun dianggap buruk dan terpuruk.

Angin segar perubahan di BUMN berhembus awal Februari 2020. Melalui sejumlah Surat Edaran Menteri BUMN, Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) mulai dilakukan. Kementerian BUMN mewajibkan seluruh perseroan BUMN memiliki Sertifikat Manajemen Anti Suap SNI ISO 37001. SNI ISO 37001 tersebut memberikan standar yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau untuk meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan.

Semula, semua BUMN ditargetkan sudah mengantongi ISO 37001 pada 17 Agustus 2020. Namun hingga batas yang ditentukan saat itu, baru 53 persen BUMN mengantongi sertifikat. Menteri BUMN, Erick Thohir kemudian menargetkan kembali seluruh BUMN sudah harus mengantongi sertifikat tersebut di akhir 2020. Berikut wawancara Integrito dengan Menteri BUMN, Erick Thohir.



Dari surat edaran Anda, banyak BUMN yang menerapkan ISO 37001. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang melatarbelakangi surat edaran itu?

Saya mendapat arahan dari presiden untuk memperbaiki kinerja BUMN karena banyak sekali kasus-kasus hukum yang terjadi di BUMN. Karena itu, kita ingin adanya transformasi dari BUMN itu sendiri. Jadi awalnya itu, surat yang saya keluarkan bukan ISO 370001.

Saya pertama mengeluarkan Surat Edaran pada Desember 2019 yang melarang pemberian hadiah dalam rapat-rapat di Kementerian BUMN kepada peserta rapat. Saya dapat laporan, kadang-kadang rapat BUMN yang tertutup di kementerian ada yang bawa hadiah. Nah, ini sangat mengganggu upaya transformasi dan komitmen *good corporate governance (GCG)* dan transparansi yang

“Akhir tahun ini tidak juga terpenuhi, ya kita copot saja direksinya”

sedang diusahakan. Makanya surat edaran itu dikeluarkan.

Lalu surat edaran lain yang dikeluarkan, bahkan menjadi peraturan menteri, yaitu terkait tender di BUMN. Tender di BUMN yang selama ini bisa penunjukan langsung, ini kita perinci menjadi tender penunjukan langsung diberlakukan bila memang BUMN tersebut memiliki barang dan *expertise*, bukan *men-trading-kan*.

Terkait tender ini, gambarannya seperti apa?

Misalnya Adhi Karya, Hutama Karya, Waskita Karya, Nindya Karya ingin bekerjasama dengan Semen Indonesia, itu wajar karena Semen Indonesia produksi semen.

Contoh lainnya, misalnya airport perlu *conveyor belt*, tetapi tidak ada BUMN yang bikin *conveyor belt*. Akhirnya hanya bisa *trading* dari pihak swasta. Ini membuka potensi *mark up* yang bisa jadi temuan.

Sebenarnya presiden sudah mengeluarkan aturan sendiri mengenai keberpihakan kepada Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) lokal, dimana TKDN lokal boleh lebih mahal 25 persen. Jadi payung hukumnya sudah ada.

Yang terjadi kemudian adalah BUMN *men trading* swasta di *mark up* 30 persen, lalu karena menggunakan TKDN lokal, di *mark up* lagi 25 persen. Biayanya jadi mahal. Nah, ini yang mendasari peraturan menteri itu dikeluarkan.

Tapi, saya rasa itu tidak cukup. Lantas saya memberanikan diri, di Februari kita keluarkan surat bahwa semua BUMN wajib melakukan ISO 37001.

Sejak dirilis Februari 2020, bagaimana Anda melihat implementasi ISO 37001 di BUMN saat ini?

Saya belum puas. Hari ini saya mendapat laporan, baru 53 persen BUMN yang menerapkannya. Tapi saya akan *push* terus, kalau bisa 100 persen. Saya sudah minta Sekretaris Kementerian BUMN untuk melakukan pemantauan yang intensif dengan adanya target.

Apakah semua jajaran BUMN berkomitmen menerepkan Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) melalui ISO 37001?

Saya yakini semua direksi BUMN, karena saat ini hampir 90 pesen lebih ada perubahan. Bukan perubahan dalam arti dirutnya semua diganti, ya. Masih banyak direksi-direksi lama di BUMN, seperti di BRI dan Telkom masih direktur lama.

Jangan sampai ada persepsi bahwa Pak Erik mengangkat dirut karena *like and dislike*, tidak. Semua mendapat kesempatan selama KPI dan transformasi *good corporate governance* menjadi komitmen para pimpinan ini. Kalau bisa, akhir tahun ini 100 persen.

“Saya dapat laporan, kadang-kadang rapat BUMN yang tertutup di kementerian ada yang bawa hadiah”

Jika target tersebut tidak terpenuhi, akan ada sanksi?

Kalau misalnya sampai akhir tahun ini tidak juga terpenuhi, ya kita copot saja direksinya. Karena ini bagian dari komitmen. Kalau ini tidak dilakukan, transformasi *good corporate governance* dan transparansi tidak bisa berjalan.

Apakah terpikir masuk ruang yang lebih luas, misalnya vendor melakukan hal yang sama? Karena terbayang berapa banyak pihak ketiga yang berkerja sama dengan BUMN, baik dari perusahaan terbuka maupun perusahaan turunannya.

Jujur belum. Terima kasih untuk masukannya. Kita ingin BUMN-nya dulu dibenahi. Nanti kalau BUMN-nya baik, kita coba lebarkan.

Bagaimana dengan sumber daya manusia yang menjalankan Sistem

Manajemen Anti Suap (SMAP) di BUMN? Apakah ada pembenahan khusus?

Sekarang di BUMN kita coba ciptakan *core values*, yaitu akhlak. Itu yang juga kita coba terapkan. Saat kita melaksanakan kebijakan dan berbagai, tapi akhlaknya tidak begitu, kan sama saja bohong. Jadi Kami menegakan peraturan, transfromasi *good corporate governance* sembari melakukan pembangunan sumber daya manusianya melalui *core values* yaitu pembangunan akhlak. Jadi bersamaan.

Perubahan di Kementerian BUMN nantinya akan memberikan hasil seperti apa?

Saya harapkan kasus-kasus hukum yang terjadi bisa kita tekan dan bagaimana ekonomi biaya mahal tidak terjadi lagi.

BIODATA
NAMA
Erick Thohir
TEMPAT, TANGGAL LAHIR
Jakarta, 30 Mei 1970
PENDIDIKAN
S1 Glendale Community College, California, Amerika Serikat (AS)
S2 Master of Business Administration National University, California, Amerika Serikat (AS)
KARIR
Pendiri dan pemilik PT Mahaka Media Tbk (Perseroan) (1992 - sekarang)
Tahun 2008, bersama Anindya Bakrie, Erick mendirikan tvOne dan situs berita Vivanews.
Tahun 2014-2019 menjabat sebagai Direktur Utama antv.
Pemegang saham Persib Bandung
Mantan pemilik Inter Milan (2013 – 2016)
Mantang pemegang saham mayoritas Klub NBA Philadelphia 76ers (2012)
Ketua Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC)
Mantan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI)
Menteri BUMN RI 2019 - sekarang



Ir. Sutami

MENTERI DUA REZIM YANG MISKIN HARTA

HIDUP DALAM KEPRIHATINAN NAMUN MENINGGALKAN KARYA GEMILANG, INILAH MENTERI SUTAMI. SOSOKNYA BEGITU SEDERHANA. IA TINGGAL DI RUMAH ALA KADARNYA, BAHKAN SAAT IA SAKIT, IA TAK BISA MEMBAYAR BIAYA RUMAH SAKIT.

Kala itu, di Istana Negara, Jakarta, 7 Februari 1966, Sutami mendapat perintah langsung dari Presiden Sukarno untuk mempercepat pembangunan Gedung Conefo (Conference of the New Emerging Forces) – saat ini disebut Gedung Parlemen DPR/MPR RI.

"Saya berikan perintah kepada saudara Ir. Sutami untuk mempercepat pembangunan Gedung Conefo. Yang tadinya saya perintahkan pembangunan ini selesai pada 19 Agustus tahun ini saya perintahkan untuk dipercepat menjadi 31 Juli tahun ini," kata Presiden Sukarno saat ramah tamah dengan karyawan Komando Proyek Conefo (Kopronef).

Sutami yang menjabat sebagai Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk Urusan Penilaian Konstruksi, menyambut perintah tersebut dengan siap. Di tangan Sutami, gedung megah itu

pun akhirnya rampung pada 1968, yang sempat tertunda akibat Gerakan 30 September (G30S) dan diperuntukan bagi rumah para 'wakil rakyat'.

Tak hanya Gedung DPR/MPR RI saja yang menjadi karya emas sang Menteri Pekerjaan Umum yang menjabat selama lebih dari satu dekade. Sebelumnya, pada 1961, sewaktu ia masih menjadi Direktur Utama Perusahaan Negara Hutama Karya, ia terlibat dalam Proyek Mercusuar Jembatan Semanggi.

Warga Jakarta pasti sering melewati jembatan strategis yang menjadi simpul jalur menuju berbagai wilayah di Jakarta. Dalam perdebatan di hadapan Sukarno, ia mengusulkan agar pembangunan jembatan itu dibangun menggunakan konstruksi beton prategang (*prestressed concrete*) tanpa menggunakan tiang.

Usulan itu sangat mencengangkan, Sukarno bahkan sampai bergidik emosi dan mengancam dengan hukuman

Sutami tidak pernah tergoda untuk korupsi, penampilan dan tindakannya tetap bersahaja. Ia sama sekali tak pernah bermewah-mewahan.

gantung kepada Sutami lantaran ide "gila" Sutami dianggap tak masuk akal dan terkesan tak serius menangani proyek mercusuar itu. Lulusan Teknis Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) 1956 itu pun dengan tegar menjawab Sukarno, "Tetapi itu memang pendapat saya, berdasarkan perhitungan yang cermat," seperti dikutip dalam esai berjudul Sutami Sosok Manusia Pembangunan Indonesia yang dimuat di majalah Prisma (Desember 1991).

Keberanian Sutami membuat Sukarno takjub dan akhirnya luluh juga. Ia kemudian mengizinkan Sutami memulai serangkaian penyelenggaraan Proyek Mercusuar menggunakan caranya sendiri. Proyek Jembatan Semanggi secara resmi dimulai pada 1961.

"Kalau Pak Sutami kan tidak memakai tiang. Waktu itu, *it is something new*, inovasi, di Indonesia pertama kali,"

kata Suyono Sosrodarsono, Menteri PU zaman Orde Baru, yang kala itu mengikuti pertemuan sebagai insinyur muda.

Sepanjang masa jabatannya sebagai Menteri PU di Kabinet Pembangunan, Sutami banyak memelopori berbagai pembangunan seperti: waduk besar, pembuatan saluran irigasi tersier, dan pusat-pusat tenaga listrik. George J. Aditjondro melalui makalah "Large Dam Victims and Their Defenders" yang dimuat dalam *The Politics of Environment in Southeast Asia* (2005: 32) secara spesifik menyebut proyek-proyek Sutami sebagai monumen pembangunan Orde Baru.

Sikapnya yang Membumi

"Pak Sutami adalah intelektual yang merakyat. Ia ingin menjadi bagian yang integral dari masyarakat. Dari kehidupannya sehari-hari, ia adalah orang yang sederhana. Dari pemikiran intelektualnya, kerakyatan itu nampak dalam konsep ilmu wilayahnya," kata Sukadji Ranuwihardjo, rektor Universitas Gadjah Mada masa bakti 1973-1981, seperti dikutip Kompas (15/11/1980).

Hendropranoto dalam tulisannya di majalah Prisma sempat menyinggung kegemaran Sutami hidup dalam kesederhanaan. Ia acap kali kedatangan menolak fasilitas-fasilitas menteri dan tidak suka merepotkan siapapun. Tidak heran jika pada akhirnya ada yang menjulukinya dengan sebutan "menteri termiskin".

Saat terjadi pelimpahan jabatan dalam Kabinet Pembangunan Orde Baru pada 29 Maret 1978, Sutami tidak lagi menerima jabatan menteri. Ia lantas mengembalikan semua fasilitas negara termasuk mobil dinas. Satu waktu seorang pengusaha berniat memberinya mobil lantaran tahu mobil dinas Sutami ikut dikembalikan namun Sutami menolak.

Sutami tidak pernah tergoda untuk korupsi, penampilan dan tindakannya tetap bersahaja. Ia sama sekali tak pernah bermewah-mewahan. Saat ia masih menjabat sebagai Menteri PU dan Tenaga Listrik, rumah Sutami banyak dikunjungi tamu. Para tamu kaget lantaran melihat ke



atap dan banyak bekas bocor pada langit-langit rumah. Ternyata rumah Sutami sudah lama bocor. Padahal, ia sudah enam kali menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum.

Memasuki 1977, kondisi kesehatan Sutami semakin memburuk. Menurut sejumlah pewarta, penyakit Sutami ditimbulkan akibat kekurangan gizi dan kelelahan. Kompas (21/3/1978) menyebut Sutami memiliki gangguan penyakit lever kronis. Dalam sakitnya, Sutami sempat takut dirawat di rumah sakit. Ia sadar bahwa dirinya tak punya banyak uang untuk membayar biaya rumah sakit.

Setelah pemerintah turun tangan, Sutami akhirnya mau diopname. Dua tahun menjalani perawatan intensif dan serangkaian operasi, Sutami tak kuasa melawan penyakitnya. Ia tutup usia pada 13 November 1980.

Sepanjang masa jabatannya sebagai Menteri PU di Kabinet Pembangunan, Sutami banyak memelopori berbagai pembangunan seperti: waduk besar, pembuatan saluran irigasi tersier, dan pusat-pusat tenaga listrik

Laporan Tahunan KPK 2019 : “Merangkai Simfoni, Melawan Korupsi”

Komisi Pemberantasan Korupsi resmi meluncurkan Laporan Tahunan KPK Tahun 2019, pada Senin (27/7) melalui talkshow online yang dibuka oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Laporan Tahunan KPK 2019 mengusung tema “Merangkai Simfoni Melawan Korupsi,” sebuah tema yang merangkum sinergi dan partisipasi. “Kedua kata ini sangat berarti bagi kami di KPK. Kami memiliki tugas untuk merangkai semuanya dalam sebuah simfoni, kerja besar orkestrasi pemberantasan korupsi,” kata Alex.

Peluncuran Laporan tahunan KPK Tahun 2019 dilakukan secara daring mengingat situasi pandemi. “Biasanya peluncuran dilakukan dengan mengundang stakeholder di awal tahun, ini baru dilakukan di tengah tahun, namun bagaimanapun juga harus tetap kita sampaikan.”

Lebih lanjut Alex mengatakan, sebagai lembaga publik, sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang KPK, KPK memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden, DPR dan BPK.

Alex menyadari, betapa cintanya masyarakat kepada KPK, sehingga ekspektasi masyarakat kepada KPK sangat tinggi, namun KPK belum bisa sepenuhnya memberikan hasil kerja terbaik, sehingga Alex menerima kritikan dan masukan jika kerja KPK belum sesuai dengan harapan masyarakat.



Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 : Jauhkan Politik Uang dan Cegah Penularan Covid-19

Komisi Pemberantasan Korupsi berharap pemerintah bisa menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 dengan penyelenggaraan yang sehat, menjauhkan politik uang dan mencegah penularan Covid-19.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufon mengatakan proses pilkada yang benar akan membuat separuh kegiatan dan perjuangan KPK dalam memberantas korupsi selesai. “Pilkada ini pembersihan korupsi secara struktural,” tegasnya. Proses ini mendorong terpilihnya orang yang berintegritas sebagai kepala daerah. Proses penyelenggaraan pemerintah daerah di tangan kepala daerah yang berintegritas akan bebas dari korupsi.

Ghufon mengatakan hal tersebut dalam konferensi pers daring (11/9) saat menyampaikan poin rekomendasi bagi pemerintah mengenai pelaksanaan pilkada serentak. Menkopolkam Mahfud

MD mewakili pemerintah menerima rekomendasi tersebut.

Ghufon menyampaikan rekomendasi yang meliputi empat poin, pertama upaya dalam pencegahan korupsi dan kecurangan, kedua menjaga netralitas birokrasi dan mengawasi fungsi pelayanan publik, ketiga menjaga kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada; dan keempat pengadaan barang dan jasa penunjang pilkada yang bebas dari praktik korupsi.

Dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi ini, KPK menyampaikan dua rekomendasi yakni pemberian suara melalui mekanisme pemilihan absensi (Absentee Ballot) dan perlindungan kesehatan bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih harus diutamakan untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Menurut Ghufon, meskipun sudah dibuka peluang mekanisme e-voting (Pasal 85 ayat (1) UU Pilkada) namun belum diatur detail dalam UU Pilkada. Dalam mekanisme ini, pemilih boleh memberikan suara melalui pos ataupun mekanisme online. Namun, kesiapan pemerintah untuk melakukan hal ini belum terlihat.

Putus Mata Rantai Covid-19, KPK Tes Swab PCR Seluruh Pegawai

Sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19, KPK bekerja sama dengan Balai Besar Teknik Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta (BBTKLPP – Kementerian Kesehatan) melakukan tes swab *Polymerase Chain Reaction* (PCR) selama 8 hari mulai 15 Juli 2020 lalu.

Kepala Biro SDM KPK Chandra Reksoprodjo mengatakan tes ini dilakukan sebagai salah satu upaya contact tracing untuk memutus rantai penularan dari kasus konfirmasi positif yang ada. “Selama 7 hari, swab test diikuti oleh 1720 orang,” katanya.

Tidak hanya pegawai KPK saja, pihak dari luar KPK yang berhubungan kerja dan berinteraksi dengan pegawai, termasuk tahanan, wartawan media yang meliput di KPK, serta pihak pengamanan dari POLRI yang bertugas di KPK.

Dari hasil tes swab PCR tersebut, kata Chandra, ditemukan 8 orang yang hasil testnya positif. Menurut dia, jika ditemukan hasil tes swab PCR positif Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, maka pihak BBTKLPP akan berkoordinasi dengan Poliklinik KPK dan Dinas Kesehatan/Puskesmas domisili pegawai. “Kami juga akan melakukan contact tracing dan pemeriksaan sampel swab anggota keluarga yang serumah hingga dinyatakan sembuh/negatif Covid-19.”



Waspada Penipuan Berkedok Bantu Pengisian LHKPN

Komisi Pemberantasan korupsi ingatkan masyarakat agar mewaspada pihak-pihak yang mengaku KPK atau bekerja sama dengan KPK dengan modus membantu pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon kepala daerah.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati menuturkan bahwa saat ini KPK sedang membuka pendaftaran LHKPN bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 sebagai persyaratan pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020, penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara online melalui elhkn.kpk.go.id. “KPK tidak pernah memungut biaya administrasi untuk layanan publik yang disediakan bagi masyarakat, termasuk dalam pengisian LHKPN,” terang Ipi.

Ipi juga mengingatkan bahwa saat ini ada beberapa pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK atau mitra kepanjangan KPK yang dapat membantu dalam pengisian LHKPN untuk calon kepala daerah dengan meminta sejumlah biaya.

KPK masih menunggu dan meminta calon kepala daerah yang belum melaporkan harta kekayaannya, agar segera menyampaikan kepada KPK. Caranya mudah, cukup hubungi KPK – Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui call center 198, email infopemilu.LHKPN@kpk.go.id atau situs <https://elhkn.kpk.go.id>

Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman

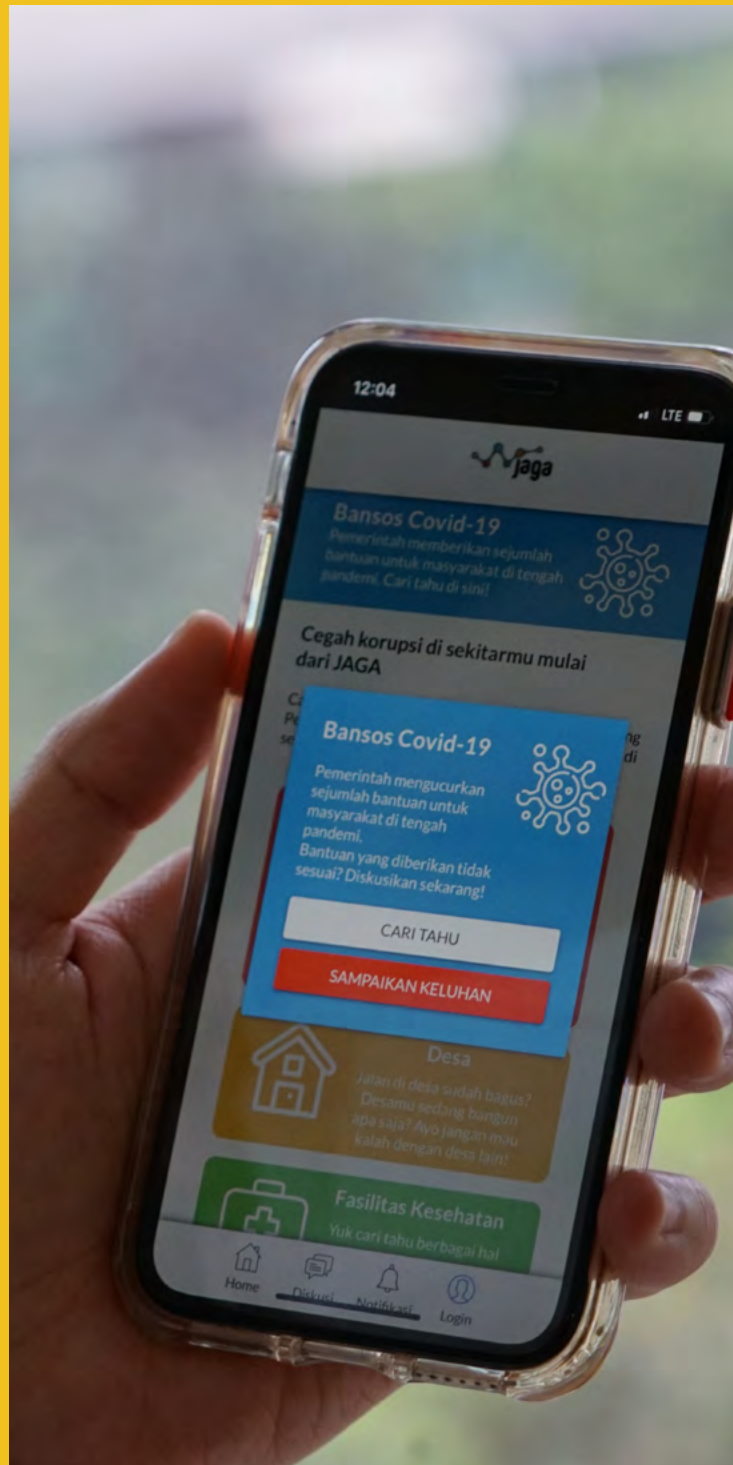
Masyarakat tidak perlu ragu untuk melaporkan temuan penyalahgunaan dana bansos melalui aplikasi JAGA Bansos. KPK menjamin keamanan pengaduan lewat aplikasi ini, agar masyarakat tak ragu lagi untuk ikut andil mengawal dan menjaga penyaluran dana bansos selama masa pandemi.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam diskusi secara live melalui Instagram @official.kpk mengatakan, seluruh pengaduan yang diterima dari masyarakat akan diverifikasi oleh KPK. "Tidak perlu takut memasukkan pengaduan lewat aplikasi ini, kami jamin 100% data pelapor aman," katanya.

Hasil verifikasi pengaduan itu oleh KPK akan disampaikan kepada Pemda yang bersangkutan dan dalam waktu 7 hari kerja Pemda harus menindaklanjuti dan membarukan hasilnya kepada KPK.

KPK, lanjut dia, perlu transparansi dan kejelasan laporan dari masyarakat. "Jangan buat laporan palsu, mengada-ada karena aplikasi ini memang dibuat untuk mengawal penyaluran dana bansos."

Jaga Bansos Covid-19 dapat diakses melalui situs jaga.id atau masyarakat dapat mengunduh di Play Store/App Store.



Ada 54 Laporan, Pemda Diminta Serius Tangani Keluhan Bansos

KPK meminta pemerintah daerah serius menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial yang disampaikan melalui aplikasi JAGA Bansos.

Berdasarkan catatan KPK, per-7 Agustus 2020, ada 54 laporan masyarakat yang lambat atau belum direspons oleh pemda. Padahal telah lebih dari tujuh hari kerja sesuai batas waktu yang ditentukan untuk memberikan respons atas keluhan masyarakat yang diterima JAGA Bansos dan telah diteruskan ke pemda terkait.

KPK menerima total 894 keluhan terkait penyaluran bansos, 369 di antaranya mengeluhkan tidak menerima bansos meskipun telah terdaftar. Enam topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, yaitu bantuan tidak dibagikan

oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 100 laporan.

Keluhan tersebut disampaikan oleh 784 pelapor yang ditujukan kepada 243 pemda yang terdiri dari 19 pemerintah provinsi dan 224 pemerintah kabupaten/kota. Provinsi yang paling banyak menerima keluhan adalah Jawa Barat dengan total 197 keluhan meliputi 26 pemda. Berikutnya adalah Jawa Timur dengan total 149 keluhan di 26 pemda dan Jawa Tengah menerima 78 keluhan di 29 pemda.

JAGA Bansos merupakan fitur tambahan dalam platform pencegahan korupsi JAGA yang diinisiasi KPK untuk menampung keluhan masyarakat terkait penyimpangan/penyalahgunaan penyaluran bansos. Selain itu, fitur ini juga menyediakan informasi panduan ringkas tentang bansos sebagai edukasi untuk masyarakat.

Masyarakat dapat menyampaikan keluhannya secara langsung melalui gawai dengan mengunduh aplikasi JAGA (JAGA Apps) di Play Store dan App Store serta melalui situs jaga.id

KPK Apresiasi 5 Lembaga yang Terapkan Manajemen Anti-Suap

Dalam salah satu rangkaian Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) 2020 yang digelar (26/8), Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang lima lembaga yang telah berhasil melakukan praktik baik penerapan manajemen anti-suap, yaitu Kementerian BUMN, SKK Migas, KADIN Indonesia, PT Pertamina Hulu Mahakam, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua KPK Firlil Bahuri menyebut kelima lembaga tersebut telah memberikan contoh komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi khususnya melalui sistem manajemen anti-suap di kementerian/lembaganya masing-masing.

"Mari terus berbuat baik walaupun

sebetulnya sulit kita disebut orang baik," ujar Firlil memberikan apresiasi.

Firlil juga membeberkan data yang telah ditangani KPK sejak tahun 2004 hingga 2018 menurut jenis tindak pidana korupsi, 64 persennya merupakan kasus penyuapan, belum lagi berdasarkan jenis profesi/jabatan, pelaku korupsi berasal dari kalangan pihak swasta yang menempati urutan kedua setelah anggota dewan.

Tentu saja data ini menjadi sangat serius, namun menurut Menteri BUMN Erick Tohir, Kementerian BUMN telah mewajibkan seluruh BUMN menerapkan ISO 37001. Ia mengatakan hingga Maret 2020 telah terdapat 82 BUMN yang melakukan persiapan pelaksanaan Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan hasil sebanyak 55 BUMN dalam tahap melakukan Training Awareness, sedangkan sisanya 27 BUMN belum melakukan Training Awareness.

BELUM TERIMA BUKTI LAPOR LHKPN

EKA SETIAWAN
via Twitter

BALASAN PERNYATAAN BERMATERAI LHKPN

HENI
via Twitter

<https://elhkpn.KPK.go.id>

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi
Gedung Merah Putih KPK - Jl. Kuningan Persada
Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950
Call Center : 198
Fax : (021) 2557 8413
Email: elhkpn@KPK.go.id

Saya sudah kirim LHKPN sejak beberapa bulan lalu via pos, tapi belum terima tanda terimanya dari KPK. Padahal itu untuk keperluan naik pangkat. Bisa tolong dicek?

Terkait dengan permintaan tanda terima pelaporan LHKPN, Direktorat LHKPN KPK harus melakukan pengecekan bukti pendukung pelaporan LHKPN-nya. Tanda terima LHKPN akan diberikan apabila telah melalui proses verifikasi dan tanda terima tersebut akan dikirimkan ke email yang sudah terdaftar di dalam aplikasi E LHKPN.

Saya sudah isi dan sudah kirim pernyataan bermaterai, tapi sudah 1 bulan belum dapat balasan dari LHKPN. Ini bagaimana ya?

Saudara yang sudah mengirimkan surat kuasa namun belum menerima tanda terima dari KPK, silahkan menghubungi admin KPK dan call center KPK di 198 dengan menyertakan nama, NIK (nomor induk kependudukan) dan instansi, serta copy resi pengiriman atau copy tanda terima penyerahan dokumen.

Jika seseorang membalas hutang budinya dengan memberikan orang lain jabatan tertentu dalam pemerintahannya, tidak ada uang yang diterima atau diberikan, apakah ini termasuk gratifikasi?

Gratifikasi tidak harus berbentuk uang atau barang untuk balas budi. Gratifikasi dapat berupa fasilitas atau jabatan yang diberikan kepada seseorang dalam pemerintahan. Praktek ini dapat mengganggu independensi pejabat dalam bekerja mengingat posisi yang iya peroleh diberikan oleh pemberi. Disamping itu dalam pengisian jabatan sudah ada mekanisme seleksi tersendiri yang menjunjung azas kecakapan, kepemimpinan dan kualitas personal.

Apa kaitannya gratifikasi dengan invenstasi? Apakah saling dukung atau bagaimana? Mohon penjelasannya.

Investasi pada dasarnya membutuhkan kepastian aturan, hukum dan pelayanan. Ketiga hal ini mutlak ada agar returns dari kegiatan investasi tinggi atau menguntungkan. Namun target ini akan terganggu bila ternyata ada embel-embel gratifikasi yang harus diberikan kepada pejabat atau pegawai negeri untuk memudahkan segala urusan bisnis, karena menambah beban biaya yang harus dikeluarkan. Gratifikasi juga akan membuat kegiatan ekonomi menjadi lebih mahal. Sehingga produk yang dihasilkan kurang memiliki daya saing.

JABATAN SEBAGAI BALAS BUDI

MALAYATI
via Twitter

KAITAN GRATIFIKASI DENGAN INVESTASI

HAR SAJA
via Twitter

<https://gol.KPK.go.id>

Layanan Pelaporan Gratifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jln. Kuningan Persada Kav. 4
Jakarta Selatan 12950
Call Center 198
Email: pelaporan.gratifikasi@KPK.go.id

MENYAPA AKSI MASA

MENGHADAPI AKSI MASA YANG TAK JARANG BERUJUNG RICUH, TATA TIDAK PERNAH MEMBAYANGKAN HARUS MENGHADAPI BERBAGAI KARAKTER PENDEMO YANG MENYAMPAIKAN ASPIRASI KE GEDUNG MERAH PUTIH KPK, TERMASUK MENERIMA DUKUNGAN DARI MASYARAKAT YANG KERAP MEMBUATNYA MENYEKA AIR DI UJUNG MATANYA.

Sebuah pesan singkat masuk ke smartphone miliknya, Tata kemudian melihat pesan dari kepolisian Setiabudi terkait pemberitahuan demo yang akan dilakukan sejumlah masyarakat di depan Gedung Merah Putih KPK. Seperti sudah menjadi makanan sehari-hari, Tata selalu bersiap menghadapi berbagai kelompok masa yang hendak menyampaikan aspirasinya kepada KPK.

“Saya selalu mengawali hari dengan bersiap menghadapi kelompok masa yang harus dihadapi hari itu,”

Tata menceritakan di tahun 2019 tercatat 352 aksi unjuk rasa berlangsung di KPK. “Pernah ada sampai 11 antrian demo dalam sehari, untuk bergantian tempat,” sebutnya.

Dia menambahkan, biasanya unjuk rasa datang dalam kelompok besar, namun ada juga yang datang sendiri berunjuk rasa. Yang disampaikan pun beragam, ada yang datang mengapresiasi kerja KPK, ada yang memberi dukungan ketika KPK sedang menghadapi situasi yang sulit dan ada juga yang datang memberikan kritikan.

Ada yang berorasi, ada yang melakukan teatrikal, ada pula yang berpuisi bahkan menggelar tahlilan di depan KPK. Semua bentuk unjuk rasa itu, demi menarik

perhatian dan dipenuhi tuntutan.

Tata sendiri tak pernah membayangkan saat menjadi pegawai KPK, dia harus berhadapan dengan pengunjuk rasa yang terlanjur emosi menyampaikan tuntutan. “Mempertahankan ekspresi muka untuk tetap *cool*, itu perjuangan sekali. Jika dihadapi dengan emosi, tidak akan terjadi dialog yang baik,” katanya.

Mensiasati pekerjaannya sebagai penerima aksi unjuk rasa di KPK, Tata mempersiapkan diri dengan ilmu komunikasi publik dan negosiasi yang baik. Dia juga memperkaya informasi lainnya terkait isu yang diusung pengunjuk rasa dan berkoordinasi dengan bagian lain di KPK untuk menindaklanjuti tuntutan perwakilan unjuk rasa.

Setelah sekian lama bertugas, Tata mengungkap hikmah yang diperolehnya, “Kita jadi dilatih empati dan jadi tahu bahwa efek korupsi di



masyarakat itu sungguh luar biasa, karena mereka yang terdampak langsung datang mengadukan nasibnya.”

Hal yang paling mengharukan bagi Tata adalah aksi dukungan seorang petani dari Ponorogo, Jawa Timur. Petani itu datang ke KPK berjalan kaki selama 2 minggu karena tidak punya uang. Dukungan tulus sang petani sangat melekat di hatinya.

Sebagai seorang perempuan, Tata juga pernah merasa takut dan khawatir menghadapi masa aksi di KPK. Sambil menghela nafas panjang, Tata menceritakan ketakutannya menghadapi unjuk rasa yang terjadi di September hingga Oktober 2019,

ketika revisi undang-undang KPK bergulir. Kala itu aksi unjuk rasa berlangsung ricuh yang berujung vandalisme. Itu pertama kalinya dia merasa takut menghadapi aksi unjuk rasa di KPK.

“Kaki *tuh* sampe gemeteran. Tapi saya tetap berusaha tenang, tidak ingin mereka tahu kalau saya takut. Syukurnya saya tidak sendiri, karena selalu didampingi bagian pengamanan KPK dan polisi yang bertugas. Jadi lebih menguatkan saya,” sebut Tata.

Bertugas menemui pengunjuk rasa, Tata sadar, ia adalah “wajah” yang mewakili lembaga tempat ia bekerja. Tak ingin membuat kesalahan, Tata punya ritual sendiri saat akan menghadapi perwakilan pengunjuk rasa. Apa yang Tata lakukan agar tetap tenang menghadapi pengunjuk rasa? Simak obrolan selengkapnya di Podcast Kanal KPK pada Spotify.

SEPAKAT DI AWAL

**PENYIAR ARIE DAGIENKZ
PUNYA CARA TERSENDIRI
UNTUK MENGHINDARI
KORUPSI. PROFESINYA
SEBAGAI SEORANG PUBLIC
SPEAKER IA RASAKAN
MEMBAWA KEUNTUNGAN
TERSENDIRI UNTUK TIDAK
TERLIBAT PRAKTIK HARAM
KORUPSI.**



“Di pekerjaan saya sepertinya agak susah untuk korupsi, karena biasanya saya sudah melakukan negosiasi di awal dengan penyelenggara. Tapi saya pernah menemukan salah satu EO (*Event Organizer*) yang mau bermain nakal,”.

Arie Dagienkz menyebutkan pernah menerima permintaan untuk menuliskan nominal bayaran lebih besar dari yang ia terima. “Bayarannya segini ya tapi boleh ya kami tulis sekian,”. Namun menurutnya, ia akan langsung menolak permintaan tersebut karena menurutnya hal tersebut bertentangan dengan nilai yang ia yakini.

Komitmennya untuk tak mau berurusan dengan hal berbau korupsi juga membuatnya memilih untuk tidak melakukan kerja sama atau tawaran usaha yang datang dari rekan-rekan seprofesinya. Hal tersebut menurutnya karena dia khawatir ada konflik kepentingan dari kerjasama yang ia lakukan dengan rekan seprofesinya sebagai penyiar. “Belum lagi saya tidak terlalu paham tentang bisnis, saya takut hal tersebut malah akan membuka celah kecurangan untuk partner saya,” ungkap pria yang mengaku lebih senang disapa Dagienkz.

Rupanya Dagienkz punya pengalaman sendiri bekerjasama dengan rekan seprofesinya, sehingga ia khawatir dari kerjasama hingga bagi hasil nantinya ia dikelabui dan terdapat praktik-praktik manipulasi yang dilakukan rekannya. “Ya meskipun saya juga kadang ditipu rekan sendiri, tapi ya sudah, saya iklaskan saja,

kedepannya, saya akan lebih berhati-hati,” ungkapnya.

Dengan pembawaannya yang humoris, Dagienkz tak segan menegur praktik buruk yang dilakukan tetangganya, seperti tidak patuh membayar iuran komplek. “Ini mungkin korupsi kecil ya, tapi saya heran saja, ada tetangga yang tidak mau ikut membayar iuran komplek padahal itu untuk membayar satpam dan kebersihan,” ceritanya penuh heran. Dagienkz mengaku dengan spontan menegur tetangganya agar mau membayar iuran di tempat tinggalnya. Menurutnya, cara untuk melawan korupsi bukan sebatas menjauhi perilaku koruptif, tetapi juga mampu menegur lingkungan terdekat, ketika dilihatnya melakukan hal yang menjurus ke arah korupsi.

“Cara untuk melawan korupsi bukan sebatas menjauhi perilaku koruptif, tetapi juga mampu menegur lingkungan terdekat, ketika dilihatnya melakukan hal yang menjurus ke arah korupsi “

Memperingati Hari Kemerdekaan RI ke 75, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sejumlah lomba bertema “AKU KPK, AKU MERAH PUTIH” yang dilangsungkan secara online untuk seluruh pegawai KPK. Rubrik ekspresi kali ini menyuguhkan karya pemenang lomba esai.

KPK Merah Putih

Prima Agung Saputra

Hari semakin hangat. Matahari merangkak naik menuju tempat tertinggi. Dengan langkah tertatih seorang wanita tua memasuki *lobby*. Penantian wanita tersebut pun berakhir, ia dipersilahkan memasuki ruangan yang ia tunggu sejak tadi. Setelah pintu ruangan tertutup, ia duduk dan meletakkan dokumen di atas meja. Perlahan ia mulai menceritakan permasalahan yang dialaminya, tanpa menunggu lama air matanya mulai jatuh, suaranya tercekat. Ia tunjukkan dokumen yang dibawanya, terdapat foto rumah di atas lahan yang kini menjadi sengketa dengan perusahaan swasta. Perjalanan jauh ia lakukan demi memperjuangkan haknya, dari Sumatera menuju Jakarta. Setelah dilakukan verifikasi, sayangnya materi pengaduan yang disampaikan bukan kewenangan KPK. Petugas pengaduan pun kemudian bertanya, “*Mengapa Ibu jauh-jauh datang ke Jakarta hanya untuk menyampaikan pengaduan ke KPK? Bukankah di daerah Ibu ada lembaga lain yang lebih tepat untuk menangani masalah yang Ibu sampaikan?*” *Sejenak terdiam, lalu wanita tersebut menjawab, “Karena saya hanya percaya KPK!”*

Peristiwa di atas hanya salah satu dari sekian banyak cerita yang dialami Petugas Pengaduan Masyarakat KPK. Ada sekitar 5.000 - 9.000 pengaduan yang diterima KPK setiap tahunnya. Begitu banyak masyarakat yang tanpa lelah memperjuangkan haknya, mulai dari Aceh hingga Papua. Perjalanan jauh tidak menjadi halangan bagi mereka untuk menyuarakan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerahnya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang terancam baik ekonomi, karir, keluarga hingga nyawanya karena memilih untuk bersuara. KPK menjadi pilihan utama dan satu-satunya, itu yang seringkali mereka katakan. Begitu besar kepercayaan yang mereka gantungkan kepada KPK. Saat-saat itulah yang membuat rasa cintaku semakin besar dan teramat bangga menjadi bagian dari KPK.

Aku KPK

Ungkapan Aku KPK dapat diartikan perasaan bangga yang begitu besar disertai kepemilikan yang kuat terhadap KPK. Seperti orang yang jatuh cinta, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi dan memperjuangkan apa yang dicintainya. Saat begitu banyak masyarakat yang bangga terhadap KPK, sudah seharusnya kami yang berada di dalamnya merasakan lebih dari sekedar bangga. Wujud kebanggaan itulah pada akhirnya

yang melahirkan pengakuan lantang yang lahir dari masing-masing kita bahwa Aku KPK! Tentu saja Aku KPK tidak dapat berdiri sendiri, ia harus disandingkan dengan kesungguhan dan tanggung jawab karena pengakuan bahwa Aku KPK merupakan bentuk kebanggaan untuk melayani kepentingan masyarakat. Berusaha memberikan kontribusi terbaik dalam upaya pemberantasan korupsi. Tentunya untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Dengan demikian Aku KPK adalah marwah yang harus dijaga, integritas yang selalu menyala, dan amanah yang harus ditunaikan. Sebaliknya, pengakuan Aku KPK yang berkawan dengan arogansi dan kekuasaan hanya akan menimbulkan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Jika itu yang terjadi, apa bedanya dengan oknum masyarakat yang mengatasnamakan LSM menyerupai KPK yang bekerja hanya untuk menakut-nakuti demi mendapatkan upeti.

Pengakuan bahwa Aku KPK tidak hanya berbicara antara aku dan lembaga, namun lebih dari itu yakni antara aku dengan nilai-nilai yang ditanamkan KPK. Internalisasi nilai-nilai KPK dalam setiap diri kita menjadi penting, tidak hanya dalam pekerjaan sehari-hari namun juga dalam kehidupan pribadi. Dengan demikian, Aku KPK akan tetap nyata dan selalu ada meskipun masing-masing kita pada akhirnya tidak lagi berada di rumah KPK karena setiap kita memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan nilai integritas dan virus anti korupsi di manapun berada. Descartes pernah berkata, “*Cogito Ergo Sum*” yang artinya *Aku Berpikir maka Aku Ada*. Dengan sedikit gubahan, ungkapan yang tepat untuk insan KPK adalah *Aku Berintegritas maka Aku KPK!*

Aku Merah Putih

“*KPK sekarang sudah berubah!*”, banyak orang mengatakan demikian. Tentu saja KPK harus berubah, apalagi sejak berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 yang merevisi UU KPK sebelumnya. Perubahan tersebut mulai dari kedudukan lembaga, organ kelembagaan, prosedur penindakan, hingga status pegawai. Mau tidak mau KPK harus berubah untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan seraya tetap berusaha menjalankan tugas dan fungsi lembaga dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya untuk menjaga kepercayaan masyarakat, namun lebih dari itu untuk memulihkan hak-hak masyarakat agar dapat hidup bermartabat. Walaupun KPK berubah, namun warna KPK tidak akan pernah berubah. KPK tidak akan menjadi hijau, merah, kuning, coklat, hitam, ataupun putih, tetapi KPK akan tetap merah putih!

Identitas warna KPK tercermin dalam gedung KPK yang berwarna dominan merah putih dan dikenal dengan sebutan Gedung Merah Putih KPK. Pilihan warna merah putih pada gedung tersebut menunjukkan bahwa KPK adalah milik bangsa Indonesia, bukan milik individu, kelompok, maupun golongan tertentu. Apalagi pembangunan gedung KPK turut melibatkan peran serta masyarakat. Banyak dari mereka termasuk kaum papa yang ikut menyumbangkan uang koin untuk pembangunan gedung KPK yang terhambat akibat ulah wakil rakyat. Dengan begitu setiap masyarakat berhak ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dan upaya perbaikan terhadap KPK.

Warna merah putih sendiri memiliki beragam makna. Dalam pidatonya tanggal 24 September 1955 yang berjudul “*Apa Sebab Revolusi Kita Berdasar Pancasila*”, Bung Karno menyampaikan tiga fase filosofi merah putih. Warna merah putih bukan buatan Republik Indonesia, bukan buatan pergerakan nasional, apalagi buatan Bung Karno dan Bung Hatta, namun warna merah putih sudah ada sejak enam ribu tahun lalu sebelum datang agama dan kebanyakan orang masih mengira bahwa yang memberi hidup adalah matahari. Siang matahari, malam bulan. Matahari merah, bulan putih. Itulah fase pertama.

EKSPRESI

Fase kedua, alam ini ada yang hidup bergerak (manusia dan binatang) dan ada yang hidup tidak bergerak (tumbuhan). Manusia dan binatang itu darahnya merah (getih), tumbuh-tumbuhan darahnya putih (getah). Keduanya menjadi Getih - Getah, hanya dibedakan dengan huruf i dan a saja. Fase ketiga, manusia mengerti akan kejadian manusia yaitu dari hubungan laki-laki dan perempuan. Perempuan adalah merah (darah), laki-laki adalah putih (sperma). Itulah sebabnya turun temurun merah putih selalu diagungkan, sejak zaman kerajaan Singosari, era pergerakan nasional, hingga saat proklamasi 17 Agustus 1945 dinyatakan Sang Merah Putih adalah bendera kemerdekaan Indonesia.

Itulah filosofi merah putih yang disampaikan Bung Karno. Tentu saja masih banyak arti lain dari merah putih yang lebih sederhana dan seringkali kita temukan. Secara spontan kebanyakan orang akan mengatakan bahwa merah artinya berani, sedangkan putih artinya suci. Atau seperti lirik lagu Kebyar-Kebyar ciptaan Gombloh, merah adalah darah dan putih adalah tulang. Namun jika kita resapi lebih dalam, apapun arti merah dan putih yang telah disebutkan semua memiliki kesamaan, yaitu warna merah dan putih saling menyempurnakan untuk menjadi merah putih sehingga terciptalah Indonesia.

Esensi dari merah putih adalah persatuan karena merah dan putih tidak dapat berdiri sendiri. Jika merah sendiri dan putih sendiri, maknanya jadi hilang. Persatuan menjadi penting mengingat kemajemukan adat, ragam budaya, bahasa, ras dan agama yang ada di Indonesia. Persatuan pula yang pada akhirnya membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sama halnya dengan KPK, persatuan adalah kunci utama agar dapat tercapainya visi lembaga yaitu menurunkan tingkat korupsi bahkan hingga mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Perbedaan instansi asal, direktorat, status pegawai, dan keberagaman lainnya adalah kekayaan yang dapat membuat KPK semakin berdaya dan digdaya. Bukan malah sebaliknya yang akan menjadi ancaman bagi eksistensi lembaga.

KPK Merah Putih

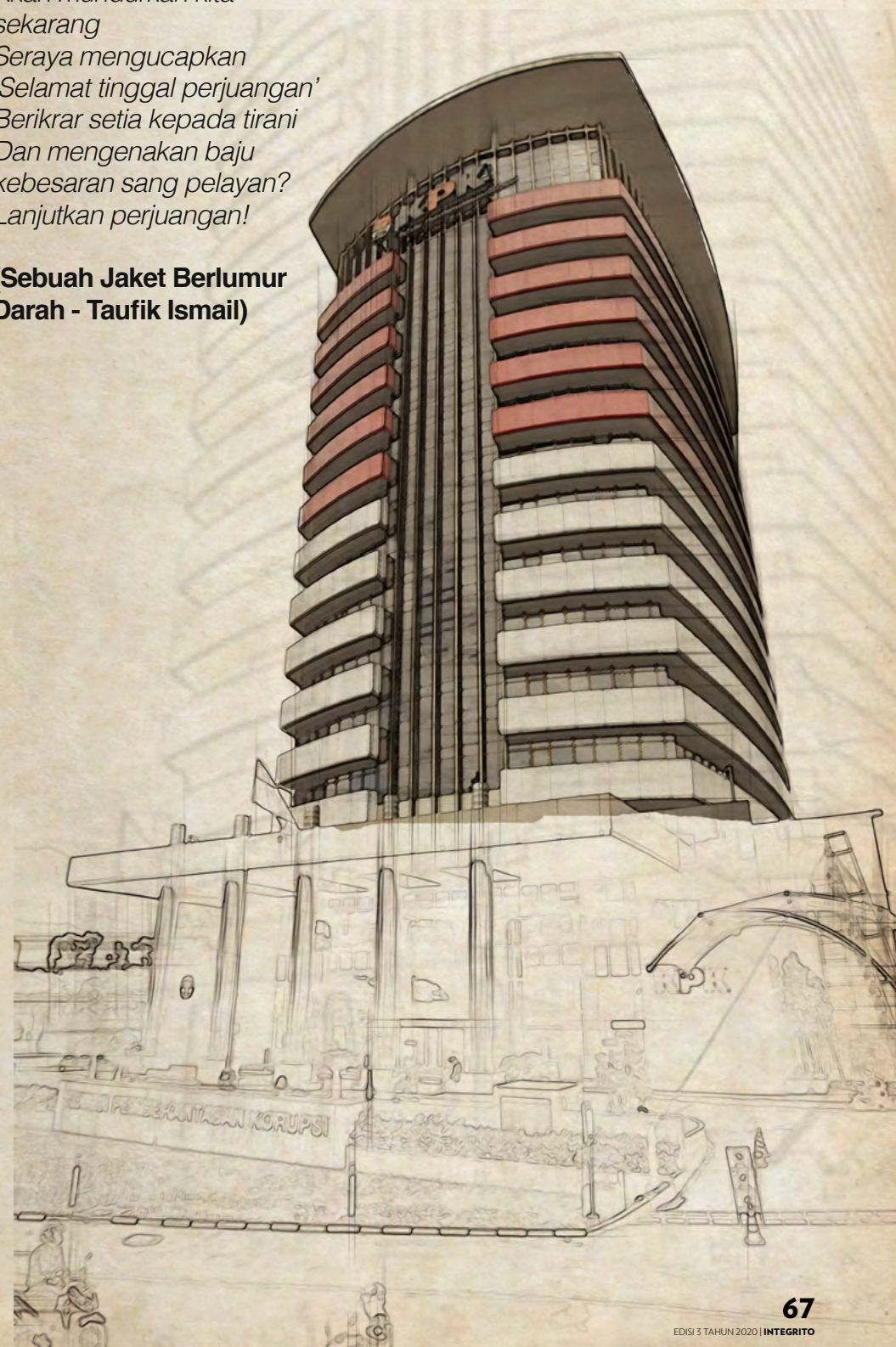
Aku KPK adalah bagian dari Aku Merah Putih. KPK sebagai entitas lembaga, merah putih sebagai negara bangsa. Nilai-nilai KPK tidak cukup hanya ditanam dalam jiwa, namun ia perlu dirawat dengan merahnya darah dan dijaga dengan putihnya tulang agar nilai-nilai KPK dapat tetap hidup dan tumbuh dalam setiap pribadi kita. Memang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada lembaga KPK, namun kita dapat meyakini bahwa KPK akan tetap ada selamanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dwiwarna adalah sesuatu yang berwarna dua atau nama yang diberikan kepada bendera pusaka, sang Merah Putih. Lalu apakah ada dua warna KPK, merah dan putih? Tentu tidak, karena tidak ada KPK Merah dan KPK Putih, yang ada hanyalah KPK Merah Putih. Merah putih pada KPK tidak dapat dipisahkan karena merah putih adalah tanah air dan bangsa yang melahirkan Indonesia.

Perjuangan mempertahankan merah putih adalah keniscayaan. Dahulu para pemuda pernah merobek bendera Belanda di Hotel Yamato Surabaya hingga menyisakan warna merah putihnya saja karena Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Bukan berarti Indonesia kini telah terlepas dari penjajahan, namun eranya sudah berganti. Perang fisik berubah menjadi perang ekonomi, ideologi, dan teknologi. Sasarannya tidak lagi negara, namun sudah lebih jauh yaitu menyerang setiap anak bangsa. Tentu kita tidak ingin menyaksikan di saat merah putih tetap dapat berkibar di langit Indonesia namun warna yang melekat di hati jutaan anak negeri berubah menjadi warna warni, persis seperti warna banyak bendera di luar negeri. Untuk itu perjuangan menjaga KPK dan mempertahankan merah putih tidak boleh berhenti, apalagi mati.

*Akan mundurkah kita
sekarang
Seraya mengucapkan
'Selamat tinggal perjuangan'
Berikrar setia kepada tirani
Dan mengenakan baju
kebesaran sang pelayan?
Lanjutkan perjuangan!*

**(Sebuah Jaket Berlumur
Darah - Taufik Ismail)**



WUJUD KONGKRIT SEMANGAT, SIKAP ANTIKORUPSI



Pauline Arifin & Daniel Luke
Consultant, Certified LA ISO 37001
Anti-Bribery Management



Pada pelaksanaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi Rabu 26 Agustus 2020 di Jakarta, Menteri BUMN Erick Tohir menyampaikan bahwa Kementerian BUMN telah mewajibkan seluruh BUMN menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016.

Per 16 September 2020 tercatat 46 BUMN telah menerapkan dan berhasil tersertifikasi SMAP ISO 37001.

Tindak pidana korupsi penyuapan seakan menjadi modus terfavorit bagi koruptor. Buktinya, data dari Anti-Corruption Clearing House (ACCH) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana korupsi penyuapan dari tahun 2004 hingga 2018 mencapai 564 kasus dari total 887 kasus yang ditangani oleh KPK atau sebesar 63,58%.

Salah satu langkah pencegahan yang dilakukan oleh dunia internasional adalah dengan menerbitkan standar ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System. Tak lama setelah diterbitkan, pada November 2016, standar ini pun segera diadopsi secara identik oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) menjadi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) melalui SK Kepala BSN No. 248 Tahun 2016.

Manfaat bagi Organisasi/Lembaga maupun Perusahaan

Lahirnya standar ISO ini disambut baik oleh semua pihak. Di Indonesia sendiri hingga akhir 2018, sebanyak 72 organisasi/perusahaan telah tersertifikasi oleh SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini. Kendatipun di Indonesia ISO 37001 relatif masih lebih dikenal oleh BUMN maupun Swasta, penerapan SMAP juga telah banyak dilakukan oleh Lembaga Publik.

SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) tidak serta merta menjamin bahwa sebuah organisasi atau korporasi yang telah menerapkannya akan terbebas dari potensi bahaya penyuapan. Logika kerangka penerapan adalah agar organisasi maupun perusahaan mampu mendeteksi, mencegah dan merespon terhadap risiko penyuapan.

Setidaknya ada lima manfaat bagi sebuah instansi,

organisasi, atau korporasi yang telah menerapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini. Pertama, organisasi menjadi mampu untuk mencegah atau menutup celah dan mendeteksi adanya potensi penyuapan yang dilakukan oleh oknum baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan, serta mampu melakukan langkah-langkah yang tepat jika tindakan suap itu terjadi. Salah satunya pada klausul 4, organisasi harus melakukan identifikasi terhadap isu internal dan eksternal, kebutuhan dan harapan stakeholder, menentukan lingkup SMAP serta melakukan Bribery Risk Assessment (BRA) yakni penilaian risiko penyuapan berdasarkan job descriptions serta perspektif jabatan yang penilaian risiko penyuapannya berada di atas batas rendah. Hasil dari BRA ini memungkinkan organisasi merumuskan aksi mitigasi risiko penyuapan sejak dini dan terperinci.

Kedua, transformasi dari *high cost economy* menjadi *lower cost economy*. Proses bisnis korporasi menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat menekan berbagai biaya atau pengeluaran yang tidak perlu. Penekanan biaya ini tentu dapat membuat ongkos produksi dan operasional menjadi lebih rendah sehingga harga jual produk barang dan jasa yang ditawarkan juga menjadi lebih murah. Dengan kata lain, SNI ISO 37001:2016 dapat meminimalisasi terjadinya *high cost economy* di korporasi tersebut.

Sebagai contoh salah satu keran akun ataupun alokasi dana perusahaan

yang rentan disalahgunakan adalah alokasi jamuan, donasi, sponsorship ataupun *corporate social responsibility* (CSR). Besarnya alokasi budget yang diperuntukkan untuk jamuan, donasi dan sponsorship selaras dengan besarnya risiko alokasi budget berpotensi disalahgunakan untuk penyuapan. Salah satu mitigasi risiko hal tersebut adalah dengan mengurangi misal hingga 50% alokasi budget untuk jamuan atau yang sering juga disebut *entertainment cost*. Harapannya, bila setiap perusahaan mengurangi setidaknya hingga 50% biaya jamuan atau *entertainment cost*, potensi terjadinya penerimaan atau pemberian gratifikasi yang berkaitan erat dengan jabatan akan berkurang 50% pula.

Berikut gambaran hasil survei yang dilakukan SustalN menjelang E-Seminar Upaya Memastikan Pelaksanaan CSR dalam Implementasi Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001 yang dihadiri oleh hampir 400 orang dari berbagai pihak Swasta, BUMN/D, Universitas, Praktisi, Lembaga Penegak Hukum serta pihak Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Menurut sejumlah 297 Responden, bahwa penyebab CSR disalahgunakan adalah antara lain karena: (1) mekanisme pengawasan yang kurang memadai, (2) perencanaan yang tidak jelas, (3) kompetensi Pengelolaan CSR kurang memadai dan (4) tekanan yang lebih besar dari kewenangan Perusahaan.

Ketiga, berkelindan dengan manfaat kedua, SMAP ISO 37001 bermanfaat untuk mengubah mindset anggapan yang seharusnya tidak boleh dianggap benar terus menerus, yakni "bisnis mau

berhasil pasti harus menyuap". Semakin efektif bila Komisi Pemberantasan Korupsi bersama K/L lainnya serta Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi juga mendorong penerapan SMAP pada pihak regulator baik di pusat maupun di daerah. Semakin efektif bila diterapkan oleh Lembaga politik. Minimal sebagai tahap awal dilakukan gap analysis Tata Kelola Organisasi terhadap kebijakan, prosedur yang telah ada disandingkan dengan SMAP ISO 37001. Membangun ekosistem antipenyuapan perlu dilakukan bukan hanya dari sisi bisnis namun juga berbagai pihak.

Keempat, SMAP SNI ISO 37001:2016 diakui secara internasional ini, dapat membuka peluang kerja sama bisnis yang lebih luas. Pasalnya, SMAP dapat meningkatkan kepercayaan investor atau pihak lain yang akan menjalin kerja sama dengan organisasi tersebut. Mereka akan merasa aman bekerja sama dengan organisasi yang jelas prosedurnya, jelas dan tegas professional beintegritas tidak kompromi dengan penyuapan dalam bentuk apapun.

Bagaimana Penerapan SMAP ISO 37001 dapat berkontribusi pada peningkatan IPK

Semakin banyak organisasi, instansi, dan korporasi yang menerapkan SMAP ISO tentu akan membuat iklim bisnis di Indonesia semakin baik. Minim kesempatan bagi oknum pejabat yang memeras atau meminta. Jika ada upaya pemerasan pun, organisasi atau korporasi sudah memiliki SOP yang jelas untuk menolak atau tidak menurutinya. Sarana pengaduan pun juga telah tersedia. Iklim berbisnis yang semakin baik di Indonesia tentu juga akan meningkatkan tingkat kepercayaan pihak luar dan investor untuk berani menjalin hubungan bisnis atau berinvestasi di Indonesia. Budaya yang tercipta di dalam organisasi pun menjadi semakin baik.

Kita optimis, meningkatnya kepercayaan dunia internasional untuk berbisnis secara sehat di Indonesia juga akan membuat Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia meningkat. Mari terus bahu membahu konsisten bangun kompetensi sikap antikorupsi untuk Ibu Pertiwi.

**Judul:**

Buku Aktivitas: Mari
Bermain Bersama Kumbi

Penulis:

Eva Y. Nukman

Ilustrasi:

Ferry Magenta Studio

Penerbit:

Komisi Pemberantasan
Korupsi

Direktorat:

Pendidikan dan Pelayanan
Masyarakat

Tahun Terbit:

2016

Kolasi:

30 halaman

Bahasa:

Indonesia

MARI BERMAIN BERSAMA KUMBI

Buku Aktivitas: *Mari Bermain Bersama Kumbi* ini diisi dengan permainan, tebak-tebakan, puzzle, latihan mengasah otak dan pesan moral dalam menjaga lingkungan dan kerajinan-kerajinan tangan yang bisa dibuat dari bahan bekas. Buku ini sangat cocok bagi para orang tua maupun anak-anak Indonesia yang ingin belajar mengenai nilai-nilai integritas dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami.

Diceritakan dalam buku ini, Kumbi dan teman-temannya sedang asyik bermain bola namun tiba-tiba saja, Praangg! Suara kaca rumah Pak Tantan pecah akibat tendangan bola. Teman-teman Kumbi lalu kabur bersembunyi, kecuali Kumbi, ia mengatakan "Mari kita jujur saja, kawan. Kita yang berbuat, kita harus bertanggung jawab".

Akhirnya Kumbi dan teman-teman pergi ke rumah Pak Tantan dan meminta maaf. Pesan dari buku ini, jika kita melakukan kesalahan sekecil apapun kita harus berani bertanggung jawab dan jujur agar menjadi kebiasaan yang baik dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari.

Buku ini juga menggambarkan bahwa setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing, ada yang suka menari, bermain alat musik, masak dan sebagainya. Belajar untuk bisa melakukan sesuatu itu harus bersungguh-sungguh bukan dengan melakukan berbagai alasan untuk membohongi orang. Nah, cerita ini dapat ditemukan di serial si Kumbi yang berjudul *Modo Tak mau Menari*.

Dalam cerita ini Modo berpura-pura sakit gigi agar ia tidak menari, namun sebenarnya Modo ingin menyembunyikan bahwa ia tidak bisa menari. Ketika hal tersebut diketahui oleh teman-temannya bahwa ia berpura-pura sakit, ternyata temannya tidak marah, mereka membantu Modo untuk belajar menari.

Modo kemudian mencoba berkali-kali untuk bisa menari dengan baik, namun tetap tidak bisa. Berbeda ketika ia mencoba memainkan bibili, alat musik yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ia justru dapat memainkannya dengan asyik. Cerita ini menarik sekali bukan, orang tua dapat memberikan pemahaman bahwa kelebihan setiap anak itu berbeda-beda, dalam cerita ini Modo memiliki kelebihan dalam memainkan alat musik daripada menari. Dan, mengaku jujur akan ketidakmampuan kita juga lebih baik dan lebih disukai teman-teman.

Cerita lainnya juga masih banyak lho, serial Kumbi ini benar-benar memberikan kisah menarik dan sederhana yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ada pula cerita berjudul *Suatu Hari di Museum Seni*, yang menceritakan tentang Kancil yang mencuri mentimun di museum seni saat Kumbi dan teman-temannya sedang melakukan kelas melukis di sana.

Seru sekali menyimak kisah-kisah *Buku Aktivitas: Mari Bermain Bersama Kumbi*, dilengkapi dengan gambar dan warna-warna yang menarik untuk dibaca anak-anak usia dini maupun bagi orang tua yang ingin mengajarkan nilai-nilai kebaikan bagi anak-anaknya.

Buku ini bisa dibaca secara langsung juga, yuk datang langsung ke perpustakaan KPK RI di Gedung Merah Putih Jalan Kuningan Persada Kav.4, Jakarta Selatan, Lantai Dasar.



RAPOR

Warna merah dalam rapor Arman (9) membuat dirinya gelisah dan tak berani untuk meminta tanda tangan Bimo (41), ayahnya sendiri. Padahal, tanda tangan itu sangat penting, alhasil, Arman mendapat teguran dari sang wali kelas dan terancam tidak akan menerima rapor karena tidak terdapat tanda tangan orang tua murid dan kepala sekolah. Rasa takut dan kegelisahan Arman membuatnya berusaha keras untuk mendapatkan tanda tangan Bimo dengan berbagai cara, meskipun harus memalsukan tanda tangan. Sebelumnya, Arman telah berusaha membujuk sang kakak untuk mau menandatangani rapornya, namun berhubung nilai sang adik kecil, kakaknya juga tak berani mengambil risiko.

Tiba di rumah, Arman yang masih mengenakan seragam sekolah dan ikut makan siang bersama sang bapak di meja makan. Sehabis Bimo selesai makan, Arman mendapati sebuah surat yang tergeletak di meja makan, mklum saja Bimo ialah seorang kepala desa, jadi banyak surat yang memerlukan tanda tangannya.

Durasi :

12 menit / 00:12:06

Bahasa :

Indonesian

Format :

MP4 (Full HD)

Rumah Produksi :

Videografi Unsri, PadiPadi Creative

Executive Producer :

Komisi Pemberantasan Korupsi

Produser :

Rafi Ahmad Farras

Sutradara :

Muhammad Ghazy Alfariqh

Penulis Naskah :

Elvina Luckita

Pemain :

Rully Arizky sebagai Arman, Ahmad Joni Arla sebagai Bimo (kepala desa), Muhammad Fadlan Faris sebagai Yantok



TAHUKAH ANDA?

PRIA JUJUR KEMBALIKAN EMAS BATANGAN SENILAI TIGA MILIAR

Adagium “masih ada orang jujur di zaman sekarang” nyatanya terjadi di Utrecht, Belanda. Seorang pria diketahui mengembalikan emas batangan yang terjatuh dari mobil van di Utrecht. Menurut RTL Nieuws yang dikutip NL Times, emas batangan tersebut bernilai antara Rp200 ribu – Rp235 ribu euro (sekitar Rp3 – Rp3,7 miliar). Kejadian tersebut terjadi pada 15 November 2019, awal mulanya seorang sopir van mengambil paket emas batangan di Royal Mint, ketika sampai di jalan raya A2, sopir menemukan bahwa pintu samping van tidak tertutup dengan benar dan kotak berisi emas hilang.

Pemiliknya, yang tidak diidentifikasi,

menawarkan hadiah Rp25 ribu euro (senilai Rp388 juta) bagi penemu emas batangan. Dalam sayembara tersebut, pemiliknya pun menekankan bahwa emas batangan tidak mungkin bisa dijual.

Pada 24 November, Kepolisian Utrecht memberikan keterangan dalam Twitter bahwa penemu emas batangan telah menghubungi pihak kepolisian dan berniat mengembalikan emas yang ditemukannya. Polisi lantas mengembalikan emas batangan tersebut kepada sang pemilik setelah menunjukkan bukti kepemilikan.

Wah, benar-benar masih ada ya orang jujur di zaman sekarang. Meskipun tidak dilaporkan apakah pria penemu emas batangan tersebut mendapatkan imbalan atau tidak namun ia telah menunjukkan sikap mulia dalam kejujurannya mengembalikan sebuah barang yang bukan miliknya.



Anti-Corruption Learning Center

Corruption Eradication Commission of Indonesia

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

**Pusat Edukasi Antikorupsi
(Anti-Corruption Learning Center)
Komisi Pemberantasan Korupsi**

**Jalan H. R. Rasuna Said kav. C-1
Jakarta Selatan 12920
DKI Jakarta
Indonesia**

Tel. : +62 21 2550 8300
e-mail: informasi@kpk.go.id
Web.: <http://www.aclc.kpk.go.id>

SAJIAN ASIK ANTI KORUPSI

Kanal
KPK



www.kanal.kpk.go.id

Instagram: [kanal_kpk](#) YouTube: [kanalKPK](#) Twitter: [kanal_kpk](#)